

Edisi 16 - 22 Maret 2022

No. 3935

Tahun LII

Sinar Tani

P E R T A N I A N I N D O N E S I A B A R U



e-mail : sintani@cbn.net.id
redaksi@tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 087881605773
TERBIT SETIAP HARI RABU

Scan to visit our website :
www.tabloidsinartani.com

5 Jelang Ramadhan, Pemerintah Pastikan Pangan Aman

12 KUR Taksi Alsintan Mengucur di Jawa Timur

Ramadhana, Buktikan Milenial Bisa Jadi Pengusaha Sawit

6



SAWIT BAIK



sawit
BPD PKS

Mempercepat Laju Peremajaan Sawit Rakyat

Dapatkan E-paper Tabloid Sinar Tani dengan mendownload aplikasi Sinar Tani - Wikitani



Info Berlangganan SMS/WA : 0813 1757 5066

ADVANTA

PINGIN BEJO?
NANDUR ADV BEJO !!

HASIL PANEN TINGGI !! REVENUE TINGGI !! HARGA EKONOMIS !!



EDITORIAL



Memahami Peran BDPKKS Dalam Peremajaan Sawit Rakyat

Empat biji kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elyas Teysman, berhasil tumbuh dengan subur (Wikipedia). Siapa nyana, dari empat pohon sawit tersebut, kini telah menjelma perkebunan kelapa sawit seluas 16,2 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Sawit Indonesia merajai pasar dunia.

Tabloid kesayangan kita kali ini akan lebih jauh menyentuh dunia perkebunan, khususnya perkebunan rakyat yang memang menjadi target penyuluhan dalam berbagai aspek. Satu seri Webinar akan digelar oleh tabloid ini. Webinar pertama yang mengusung judul "Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat" yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022 telah diikuti sejumlah besar peserta dengan antusias dan menghasilkan informasi yang sangat berharga.

Produk perkebunan kita memang merajai pasar dunia, tetapi soal produktivitas boleh dibilang belum mencapai potensi terbaiknya, kalau tidak dikatakan masih rendah. Kelapa sawit tidak terkecuali, terlebih sawit rakyat. Banyak perkebunan rakyat yang sudah berumur tua. Maka peremajaan kebun adalah strategis. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.

Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan manfaat ekonomi, perannya sebagai penyumbang devisa, serta pendapatan dan kesejahteraan pekebun. PSR menjadi program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS). Badan ini ditugasi menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) untuk digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dilaksanakan dengan mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan ekspor, serta edukasi masyarakat untuk mengenai kelapa sawit.

Perkebunan sawit rakyat sudah berkembang sejak lama. Tetapi kelembagaan petani dan kerjasama dengan perusahaan pengolah dan pemasar belum terbangun sebaik seperti petani sawit plasma dengan perusahaan inti. Inilah kendala yang kini dihadapi oleh BDPKKS karena kelembagaan dan kerjasama merupakan persyaratan petani pekebun untuk mengajukan dana peremajaan sawit. Luasnya rentang kendali dan tidak mudahnya pengawasan, luasnya areal kerja, kompleks dan beragamnya kondisi dan masalah yang dihadapi petani merupakan kendala besar sehingga dana hibah dalam jumlah besar mirip buah simalakama bagi pengelola. Prosedur yang terlalu longgar berpotensi terjadinya *moral hazard*, sedangkan prosedur ketat mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan yang berpotensi tidak tercapainya sasaran program.

Persyaratannya skema pendanaan dan penyalurannya sudah ditetapkan tapi keberhasilannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Penyederhanaan sudah dilakukan tetapi aturan baku dan kondisi di lapangan selalu ada senjang yang membuat program PSR selalu ada hambatan.

Kesepakatan yang sinkron sangat diperlukan antar kementerian yang terlibat, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tidak lupa, harus pula mendengar suara pekebun di lapangan.



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Mendekati bulan Ramadan, pertanyaan mengenai masalah ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan mulai muncul di masyarakat. Pasalnya, bulan suci umat muslim yang jatuh di bulan April pada tahun ini biasa diikuti dengan kelangkaan dan naiknya harga kebutuhan dapur di pasar.

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai masalah kebutuhan pangan di bulan mendatang. Sebab, kedua masalah utama mengenai pangan telah diawasi dan diatasi agar stok pangan tidak langka dan melambung tinggi semasa Ramadan.

Melihat masalah pangan itu ada dua sisi. Yang pertama ketersediaan. Yang paling penting, masalah ketersediaan bisa kita jalani dengan betul dan tentu dilakukan pengukuran-pengukuran dari ketersediaan yang ada karena negara ini, dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduk kita dari 273 juta lebih yang membutuhkan (ketersediaan pangan).

Kementerian Pertanian telah melakukan validasi dan aktualisasi untuk memastikan ketersediaan pangan sepanjang bulan puasa nanti. Bahan pangan utama seperti daging dan kedelai akan menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

Yang kedua, melihat pangan dari segi stabilisasi harga. Tentu saja kalau harga pangan yang terkait dengan importasi akan terkait atau terkontaksi dengan harga-harga global atau harga internasional harian.

Seperti kenaikan harga tahu dan tempe yang terjadi akhir-akhir ini berhubungan erat dengan masalah naiknya bahan baku impor. Amerika dan Brazil, sebagai salah satu penghasil kedelai impor, belum lama ini mengalami masalah dan kegagalan panen sehingga harga bahan baku melambung.

Sementara itu ketersediaan kedelai lokal belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia. Kenaikan harga bahan baku kedelai impor akhirnya menyebabkan kenaikan harga tahu dan tempe di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kestabilan harga pangan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan agenda jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Agenda jangka pendek dilakukan demi menjawab masalah pangan yang biasa terjadi di bulan puasa.

Agenda jangka pendek telah dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Masyarakat Indonesia tidak perlu mengawatirkan masalah pangan saat puasa. Sebagai contoh, masalah ketersediaan daging sapi. Saat ini telah tersedia 234 ribu ton daging sapi lokal, sementara kebutuhan tertinggi daging sapi di masyarakat hanya 202 ribu ton.

Jadi masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan bahan pangan di bulan Ramadan. Untuk menjawab masalah pangan di jangka menengah dan jangka panjang, Kementerian Pertanian akan mendorong produksi bahan baku lokal dengan program-program untuk membantu petani dan kelancaran distribusi bahan baku.

Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Pertanian bisa melalui SMS ke: **087881605773** atau email ke: **sintani@cbn.net.id** **redaksi@tabloidsinartani.com** Jangan lupa sertakan nama dan alamat anda

Saring Tani

Bung Kontak



Kunjungi Kementan, Wapres Ma'ruf Amin jamin pasokan pangan aman.

- Mudah-mudahan harganya juga aman?

Pemerintah percepat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat.

- Bisa cepat, asalkan syaratnya ngga rumit.

Harga cabai merambat naik.

- Bisa-bisa Puasa ngga nyambel neh...



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Dok. Sinar Tani

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Iqbal; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Ibnu Abas (Kaltara), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter :** Rori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi :** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** - ; Iqbal Husein, SE; Indri; Ika; Echa Sinaga, Dewi Ratnawati; **Kuangan :** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi :** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit : PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama :** Soedjai Kartasasmita; **Komisaris :** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama : DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur :** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email : sintani@cbn.net.id, redaksi@tabloidsinartani.com; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak :** Laksus Pangkoptambda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga :** Rp. 13.500 per edisi; **Tarif Iklan :** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran :** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.00096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN :** 0852-8586;
Percetakan : PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong : Pola Kemitraan Berorientasi Agribisnis

Sapi potong telah lama dipelihara oleh sebagian besar masyarakat sebagai tabungan dan tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen pemeliharaan secara tradisional. Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keuntungan peternak.

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia, namun produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena tingkat produktivitas ternak yang masih rendah. Selain produktivitas yang rendah, populasi sapi potong di Indonesia juga masih rendah. Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas.

Untuk meningkatkan keuntungan peternak, perlu adanya program pengembangan agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan yang berorientasi agribisnis dan memperluas kegiatan ekonomi produktif petani, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing. Upaya peningkatan

daya saing usaha ternak sapi potong rakyat secara teknis dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sehingga produknya dapat dijual pada tingkat harga yang cukup yang memadai tanpa mengurangi keuntungan peternak. Perluasan kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan mendorong kegiatan usaha tani terpadu yang mencakup beberapa komoditas, seperti integrasi tanaman ternak atau tanaman-ternak-ikan.

Pembangunan pertanian dan peternakan berdasarkan konsep agribisnis perlu memperhatikan dua hal penting; pertama, berupaya memperkuat subsistem dalam satu sistem yang terintegrasi secara vertikal pada satu kesatuan manajemen, dan kedua menciptakan perusahaan-perusahaan agribisnis yang efisien

pada setiap subsistem. Jika hal ini dapat terwujud maka daya saing produk peternakan (daging, susu, dan telur) akan meningkat, terutama dalam menghadapi pasar global.

Sistem agribisnis sapi potong merupakan kegiatan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian secara simultan dengan pembangunan sektor industri dan jasa yang terkait dalam suatu kluster industri sapi potong. Kegiatan tersebut mencakup empat subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang.

Pola Kemitraan

Pengembangan sistem usaha agribisnis tersebut dapat mengakomodasi tujuan untuk

meningkatkan daya saing produk dan sekaligus melibatkan peternak skala menengah ke bawah, ada tiga alternatif kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: 1) integrasi vertikal yang dikelola secara profesional oleh suatu perusahaan swasta, 2) integrasi vertikal yang dilakukan peternak secara bersama-sama yang tergabung dalam wadah koperasi atau organisasi lainnya, dan 3) kombinasi keduanya atau dikenal dengan sistem usaha kemitraan.

Penerapan konsep kemitraan antara peternak sebagai mitra dan pihak perusahaan perlu dilakukan sebagai upaya khusus agar usaha ternak sapi potong, baik sebagai usaha pokok maupun pendukung dapat berjalan seimbang. Upaya khusus tersebut meliputi antara lain pembinaan finansial dan teknik serta aspek manajemen.

Pembinaan manajemen yang baik, terarah, dan konsisten terhadap peternak sapi potong sebagai mitra akan meningkatkan kinerja usaha, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, melalui kemitraan, baik yang dilakukan secara pasif maupun aktif akan menumbuhkan jalinan kerjasama dan membentuk hubungan bisnis yang sehat.

Persepsi peternak terhadap sistem usaha agribisnis sapi potong dengan pola kemitraan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan makin berkembangnya usaha ternak sapi potong melalui pola kemitraan yang dilakukan oleh beberapa peternak atau pengusaha peternakan berskala besar, karena secara ekonomis memberikan keuntungan yang layak kepada pihak yang bermitra.

Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat peternak khususnya, dan perekonomian nasional.

Penulis :
Siti Hafsa Husas
Penyuluh
Pertanian Pusat
BPPSDMP



SMS

Cangkul

Sampaikan Pendapat, Kritik, Saran dan Dukungan Anda tentang Pembangunan Pertanian melalui **WA, SMS ke: 087881605773** atau email ke: **sintani@cbn.net.id**
Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda. SMS terpilih akan dimuat pada **WA** atau **SMS Cangkul**.



Rabu (9/3), Tabloid Sinar Tani kembali menggelar webinar bekerjasama dengan BPDPKS bertema Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Banyak pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Berikut ini diantaranya.

Untuk mengakselerasi upaya pendampingan PSR secara berkelanjutan yang melibatkan Pemprov dan Pemkab, tentunya Pihak BPDPKS, Kemenkeu,

dan Dirjenbun harus proaktif mensosialisasikan ke Pihak DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, Gubernur serta Para Bupati yg memang daerah-daerahnya sangat potensial dan banyak masyarakat yang tertarik atau minat terhadap Program PSR tersebut. Sehingga Pemda dapat mengalokasikan dana pendampingan tersebut berdasarkan pemahaman dan persetujuan dari DPRD setempat.

(M.Yusuf, Distankan Rejang Lebong)

Kepada Bapak Hendratmojo Bagus Hudoro (Direktur Tanaman Tahunan Penyegar), Pertanyaan: 1. Untuk mendukung akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Apa saja program yang akan dan telah diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kapasitas pekebun, mengingat Program PSR tidak terlepas dari kemampuan teknis dan finansial pekebun? 2. Selama ini petani pekebun menghadapi kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi seperti

pemetaan. Konsekuensi yang dialami pekebun adalah, kebun petani terindikasi masuk kawasan hutan sehingga berdampak kepada alas hak. Berdampak terhadap pengurusan biaya sertifikat lahan menjadi mahal. Agar program PSR dapat tercapai sesuai target, Mohon dipertimbangkan agar kriteria dan persyaratan administrasi dapat lebih disederhanakan? Terima kasih.

(Nurhasyimah, BPP Gandapura Bireuen)

TANAMAN PANGAN

Jaga Pasokan, Pemerintah Susun Roadmap Jagung

Bukan lagi rahasia, persoalan jagung ini selalu saja mencuat kepermukaan. Khususnya terkait dengan ketersediaan untuk bahan baku pakan ternak. Guna memastikan ketersediaan jagung, Kementerian Pertanian telah menyusun roadmap produksi jagung hingga 2024.



Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah menyusun roadmap dari 2020-2024. Pada tahun 2020 produksi jagung dengan kadar air 25 persen sebanyak 22,92 juta ton pipilan kering, tahun 2021 (23 juta ton), tahun 2022 (23,1 juta ton), tahun 2023 (30 juta ton) dan tahun 2024 sebanyak 35,3 juta ton. Luas tanam jagung yang harus dicapai tahun 2022 sekitar 4,265,068 juta dengan luas panen 4.117.497 ha dan produksi 23.103.448 ton.

Untuk mencapai target produksi tersebut, Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan, pihaknya mendorong pengembangan jagung hibrida, kemudian budidaya jagung wilayah khusus, pengembangan jagung pangan serta di kawasan sentra produksi pangan/food estate.

Diakui, potensi peningkatan produksi jagung dalam negeri cukup besar. Misalnya, dengan memanfaatkan lahan kering yang belum optimal. Saat ini baru dimanfaatkan 19 persen. Selain itu, agroklimat Indonesia sesuai untuk budidaya jagung. "Teknologi dan inovasi jagung juga sudah cukup banyak," ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan strategi pengembangan jagung. Pertama, melalui perluasan areal tanam (ekstensifikasi). Misalnya dengan pembukaan areal tanam baru (PATB), pengembangan jagung wilayah khusus

bekerjasama dengan Perhutani, Inhutani, BUMN, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pakan Ternak, Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan lainnya.

Kedua, peningkatan intensifikasi. Diantaranya dengan penggunaan benih produktivitas tinggi, penggunaan pupuk berimbang, meningkatkan pemanfaatan lahan/peningkatan IP lahan. "Dengan terbatasnya anggaran, kami juga mendorong petani untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat melalui korporasi petani," kata Suwandi.

Selain untuk pakan ternak, saat ini komoditas jagung memiliki berbagai turunan mulai dari makanan hingga minuman dan lainnya. Potensi produksi jagung sangat luar biasa dan diharapkan pengembangan jagung tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan.

Industri Pakan

Guna menjamin pasar bagi petani dan juga menjaga pasokan jagung untuk peternak, Ditjen Tanaman Pangan meminta industri pakan ternak menjadi offtaker yang menyerap jagung petani. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Bambang Pamuji saat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Bima melakukan pengiriman perdana jagung ke Surabaya sebanyak 2.600 ton.

Perusahaan pakan kata Bambang, sebagai offtaker jagung

diharapkan melakukan kemitraan dengan petani untuk menyerap panen. Dengan demikian supply jagung dapat terjamin dan terjaga sehingga petani jagung di Bima terus terjaga mendapatkan harga yang menguntungkan.

"Oftaker sebagai pembeli memberikan kepastian harga panen sehingga petani termotivasi untuk meningkatkan pertanaman, diharapkan pihak perusahaan terus menjaga stabilisasi harga dan mudah-mudahan kesejahteraan petani meningkat," kata Bambang saat launching pengiriman jagung di PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI), Desa Monggo, Kec. Mada Pangga, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (5/3).

Bambang menambahkan, total luas panen jagung Kabupaten Bima 63.149 ha dengan produksi 475 ribu ton. Dibandingkan tahun sebelumnya diketahui produksi jagung naik sebesar 10,46 persen. Karena itu, kedepan peningkatan produksi jagung asal Bima harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

"Melihat potensi Bima yang luar biasa maka produksi jagung bisa terus ditingkatkan. Sesuai arahan Menteri Pertanian ekspor harus didorong dan jagung harus kita tingkatkan dan dipersiapkan untuk masuk pasar ekspor," katanya.

Sementara itu Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi atas dukungan dan bantuan Kementan dalam memastikan peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Bima. Pemerintah memberikan banyak dukungan untuk kemajuan petani di Bima. "Dukungan itu berupa program dan bantuan dari berbagai komoditi yang dihasilkan petani Bima," ucap Indah.

Selain itu, Indah menekankan peran PT. CPI menjadi salah satu penopang hasil panen jagung yang ditanam masyarakat Bima. Hal ini juga memotivasi setiap musim tanam, petani menghasilkan hasil panen yang terus meningkatkan sekaligus mampu mengangkat kesejahteraan petani.

"PT. CPI ini juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Tentunya saya berharap seluruh masyarakat dapat menjaga ketertiban dan keamanan karena tidak mudah untuk menghadirkan orang yang mau berinvestasi," pinta Indah.

Harapan Petani

Ketua Asosiasi Jagung Bima, Burhan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam menghadirkan offtaker di Kabupaten Bima. Jadi hasil panen terserap, petani jagung Bima juga mendapatkan kepastian harga di musim panen. "Pada awalnya petani jagung jemur jagung namun sekarang petani panen langsung jual dengan harga kisaran Rp 4.500 hingga 4.850 jagung kering panen," katanya.

Untuk efisiensi, Burhan berharap petani jagung Bima harus diberikan pelatihan mulai dari peningkatan produksi, pemupukan hingga pasca panen. Tentunya, sinergi pemerintah, offtaker dan petani yang baik menjadi awal yang baik untuk mengembangkan jagung secara optimal. "Kita siap terus berinovasi untuk peningkatan produksi dan kualitas jagung asal Bima," katanya.

Sementara itu Guna mengatasi persoalan perjangungan nasional, Dean Novel, petani dan pemilik usaha DNA yang berlokasi di Lombok menawarkan block chain. "Di Lombok kami bangun block chain pertanian jagung bermitra dengan petani," kata Novel.

Novel mengungkapkan, luas areal baku sawah untuk pertanaman jagung secara nasional 4,5 juta hektar (ha). Sedangkan yang panen pada periode Februari-Mei seluas 2,1-2,2 juta ha. Jadi pada 4 bulan pertama, setidaknya 50 persen lahan baku sudah ditanami dan panen.

Dengan kondisi pertanaman tersebut, menurut Novel menjadi penyebab produksi jagung ada waktu yang kosong. Artinya, sisa 50 persen lahan baku akan ditanami jagung tersebar pada 8 bulan tersisa (Juni-Januari). "Ini yang sebabkan ada jagung langka dan harga akan naik. Karena model pola tanam jagung kita adalah musim tanam menyebabkan secara suplai tidak bisa penuhi demand yang butuh rutin," tuturnya.

Karena itu Novel mengatakan, kunci mengatasi kekosongan pasokan adalah melalui block chain. "Block chain ini harus dibuat Bulog, Kementan atau Bapanas. Dengan cara ini kebutuhan bisa terpenuhi secara konsisten. Jadi block chain ini nanti menjadi alat stabilisasi harga," tuturnya.

**Yul/Humas Ditjen
Tanaman Pangan**

info HUMAS

Jelang Ramadhan, Pemerintah Pastikan Pangan Aman

Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, persoalan ketersediaan pangan menjadi hal yang sangat krusial. Faktanya permintaan pangan sebagai kebutuhan pokok di Hari Besar Umat Islam ini kerap mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut sering memicu gangguan distribusi, kelangkaan, hingga kenaikan harga di pasar.

Guna memastikan pasokan pangan, Selasa (8/3), Wakil Presiden, Ma'ruf Amin berkunjung ke Kementerian Pertanian. Menggunakan layanan Agriculture War Room (AWR), Wapres menyempatkan berdialog dengan ribuan penyuluh dan petani di seluruh Indonesia guna memastikan saat Ramadhan yang jatuh di awal April dapat berjalan kondusif, karena stok pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat terjamin dan tercukupi.

Kepastian itu yang Wapres dapatkan langsung tersebut berdasarkan dari hasil validasi data pangan yang dilakukan Kementerian Pertanian. "Dari laporan yang saya terima dan berbagai data yang disajikan bahwa semua kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng dan kedelai dalam kondisi aman sampai bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," ujar Wapres se usai menyapa petani dan penyuluh secara virtual.

Adapun mengenai kenaikan harga dan kelangkaan beberapa bahan pokok yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, menurut Wapres harus menjadi tanggungjawab bersama, termasuk kementerian lain yang memiliki keterkaitan dengan urusan harga pangan.

"Saya meninjau kementan dan dapat penjelasan tentang ketersediaan bahan pokok khususnya dalam menghadapi Ramadhan dan Hari Raya. Ini penting, saya tekankan tidak ada kekurangan seperti isu kedelai ataupun minyak goreng," kata Wapres.

Namun demikian Wapres Ma'ruf mengingatkan agar semua pihak wajib bekerjasama untuk mewujudkan dan menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Pihak terkait lainnya juga harus turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pangan masyarakat, mulai dari



aspek distribusi hingga upaya stabilitas harga pangan.

"Ini tidak hanya Kementan, saya minta ada kolaborasi baik dalam rangka penyiapan ketersediaan dan pengendalian harga, serta siap untuk intervensi manakala ada hal yang mengganggu ketersediaan dan kenaikan harga yg tidak sewajarnya," ungkapnya.

Ramadhan kali ini merupakan tahun ke-3 bulan puasa di masa pandemi, sehingga Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga dan mengendalikan pasokan dan harga pangan terutama di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ia meyakini dengan kerja bersama ketersediaan pangan Ramadhan tahun ini akan tetap terjaga dan terkendali seperti tahun sebelumnya.

"Mudah-mudahan Ramadhan kali ini, meskipun dunia sedang bermasalah tapi kita bisa antisipasi. Mudah-mudahan Indonesia jauh lebih siap menghadapi masalah pangan yang menjadi masalah dunia," tambah Wapres.

Validasi Data

Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga memastikan bahwa ketersediaan pangan dalam kondisi aman. Tidak ada kekurangan, apalagi kelangkaan. Meski demikian, diakui, terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas

kita dari 273 juta lebih yang membutuhkan (ketersediaan pangan)," tutur SYL.

Kementerian Pertanian telah melakukan validasi dan aktualisasi untuk memastikan ketersediaan pangan sepanjang bulan puasa nanti. Bahan pangan utama seperti daging dan kedelai akan menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

"Yang kedua, melihat pangan dari segi stabilisasi harga. Tentu saja kalau harga komoditas yang terkait dengan importasi, sangat terkait atau terkontaksi dengan harga-harga global atau harga internasional harian," lanjutnya.

SYL mencontohkan, kenaikan harga tahu dan tempe yang terjadi akhir-akhir ini berhubungan erat dengan masalah naiknya bahan baku impor. Amerika dan Brazil, sebagai salah satu penghasil kedelai impor belum lama ini mengalami masalah dan kegagalan panen, sehingga harga bahan baku melambung.

Sementara itu ketersediaan kedelai lokal belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia. Kenaikan harga kedelai impor akhirnya menyebabkan kenaikan harga tahu dan tempe di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ketersediaan dan kestabilan harga pangan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan agenda jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Agenda jangka pendek dilakukan demi menjawab masalah pangan yang biasa terjadi di bulan puasa.

Menurut SYL, agenda jangka pendek telah dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Karena itu, masyarakat Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan masalah pangan saat puasa. Sebagai contoh, masalah ketersediaan daging sapi. Saat ini telah tersedia 234 ribu ton daging sapi lokal sementara kebutuhan tertinggi daging sapi di masyarakat hanya sampai 202 ribu ton.

Dengan demikian SYL meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan bahan pangan saat Ramadhan. Namun, untuk menjawab masalah pangan di jangka menengah dan jangka panjang, pihaknya akan mendorong produksi bahan baku lokal dengan program-program yang dibentuk Kementerian Pertanian untuk membantu petani dan kelancaran distribusi bahan baku. **Yul/Biro Humas dan IP Kementerian Pertanian**

tertentu karena tingginya harga di pasar Internasional.

Meski data menunjukkan angka yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat hingga Idul Fitri, SYL menegaskan tidak berhenti hanya pada data di atas kertas. Karena itu SYL meminta jajarannya kerap melakukan validasi dan memastikan data tersebut sesuai fakta fisik di lapangan.

"Seperti kata Bapak Wapres data dan validasi sudah kita lakukan bahwa Ramadhan Inshaa Allah kebutuhan kita cukup. Terkait beberapa harga komoditas yang naik, karena sekarang kan memang harga dunia juga lagi naik, tetapi bukan berarti ketersediaan kurang. Semua cukup kok," tegasnya.

Karena itu SYL meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai masalah kebutuhan pangan di bulan mendatang. Sebab, kedua masalah utama mengenai pangan telah diawasi dan diatasi agar stok pangan tidak langka dan melambung tinggi semasa Ramadhan.

"Melihat masalah pangan itu ada dua sisi. Yang pertama ketersediaan. Yang paling penting, masalah ketersediaan bisa kita jalani dengan betul dan tentu dilakukan pengukuran-pengukuran dari ketersediaan yang ada karena negara ini, dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduk

Ramadhana, Buktikan Milenial Bisa Jadi Pengusaha Sawit

Menjadi petani sawit mandiri ternyata mampu menarik minat Ramadhana, alumni Fakultas Pertanian Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh 2019 bernama Ramadhana. Jatuh bangun sudah dirasakannya, kini dia merasakan menjadi pengusaha muda.



Ramadhana (kiri) bersama sang adik di kebun sawit miliknya di Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor perkebunan hampir 1/3 luas daratan Nagan Raya ditanami dengan tanaman kelapa sawit, baik itu perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya lebih kurang 51.000 ha maupun perkebunan perusahaan besar

lebih kurang 78.000 ha.

Tak heran jika banyak petani sawit mandiri yang muncul di Kabupaten Nagan Raya. Meskipun begitu, sebagian besar diantara mereka adalah petani sawit usia lanjut. Belum banyak petani milenial sawit yang lahir dari kawasan ini. Satu diantaranya adalah Ramadhana.

Sejak awal kuliah, Ramadhana sudah gemar bertani dengan menanam sawit varietas Tenera. Pengalamannya dalam menanam sawit, dimulai saat masih kecil berumur 7 tahun. Alhamdulillah ada 4 hektar kebun sawit di Nagan Raya. Hasil panen setiap bulan 2 kali memperoleh hasil antara 6 - 7 ton per hektar," katanya.

Setiap hari dirinya merawat kebun sawit mandiri, dikelolanya bersama 8 orang tenaga kerja yang sebagian besar berumur 50 tahunan. Pupuknya diberikan NPK Phonska setiap enam bulan dengan dosis 2 kg per batang. Alasannya menggunakan pupuk tersebut karena hasilnya meningkat dan bagus. "Saya tidak menggunakan pupuk subsidi karena sangat sulit dan tidak tersedia saat dibutuhkan," tukasnya.

Dalam keluarga bersama adiknya sejak kecil sudah biasa

dan telah terlatih dalam bertani. Ramadhana sendiri adalah anak keempat dari lima bersaudara kelahiran Sukamulya 25 Januari 1996 dari pasangan Idris dan Atidah. Di awal masa kuliah dirinya merasa susah. Ayahnya hanya seorang petani, saat melanjutkan studi penuh perjuangan, walaupun terkadang ada senangnya saat menerima kiriman uang dari orangtua.

Dirinya berkata, kuliah tidak menjamin seseorang itu menjadi sukses. "Namun setelah kuliah kita perlu mengeksplor bakat dan potensi diri kita masing-masing," tuturnya.

Makanya dirinya sampai saat ini masih hobi dengan pertanian, karena bertani sangat menjanjikan. Untuk itu ia berterimakasih kepada dekan dan dosen FP Unaya yang telah membimbingnya saat kuliah meraih gelar Sarjana Pertanian.

Dengan usia muda, Ramadhana memiliki optimisme tinggi dalam berbisnis dan membuka peluang untuk para milenial lainnya untuk bergabung di perusahaan yang dikembangkan sekarang. Dirinya menilai, pertanian membutuhkan SDM yang berdaya saing serta bisa membangun komunikasi dan berjiwa entrepreneur. "Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, tentang hari ini, bukan kamu bisa apa, tapi hari ini, kamu bisa buat apa," timpalnya. **(Abda/Gsh)**

AGRITIPS

Lemak Sawit Aman untuk Kosmetik



Produk hilir minyak sawit berupa fitonutrient (Vitamin A dan E) serta personal care diminati pasar dalam negeri dan ekspor, karena performa tinggi pada harga yang bersaing. Bahkan kualitas lemaknya tidak kalah dengan air susu ibu dan daging sapi.

Karena itu, penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan kosmetik karena aman. Kelapa sawit relatif aman digunakan untuk berbagai usia dan jenis kulit. Selain mudah didapat, relatif terjangkau, tersedia di alam, dan mudah dibudidaya.

Apabila dicampurkan sebagai moisturizer/ emollient mampu

menjaga kelembaban dan kelembutan kulit karena mudah diserap kulit. Kelapa sawit juga mampu menjadi pembusa dan pengikat kotoran berlemak sekalipun apabila dicampurkan ke dalam produk sabun wajah.

Dari data yang dikumpulkan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (**APOLIN**), potensi ekonomi betakaroten minyak sawit sebesar US\$ 4,7 miliar per tahun dan tokoferol punya nilai tambah US\$ 2,7 miliar per tahun. Sampai 2021, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemendag) RI, produk turunan kelapa sawit telah mencapai 168 jenis produk turunan bernilai tinggi. **(Nattasya/Gsh)**

PUPUK ORGANIK CAIR



HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA

TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fixasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.



L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk

C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm;
K₂O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;
Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;
Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;
Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;

Mikroba:

Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml;
Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml;
Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml;

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

KANTOR PEMASARAN :
JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail : slpjatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com
Web: www.em4-indonesia.com
Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

Mempercepat Laju Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu program pemerintah untuk keberlanjutan produksi minyak sawit di dalam negeri. Setidaknya ada 2,8 juta hektar (ha) tanaman sawit milik rakyat yang berpotensi untuk diremajakan.



Bagi bangsa Indonesia, sawit sudah menjadi kehidupan dalam sehari-hari. Bahkan komoditas tersebut menjadi pendulang devisa negara dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 451,8 triliun atau 80 persen dari permintaan negara, lebih besar dari minyak dan gas.

Bukan hanya itu, komoditas sawit juga menjadi penyerap lapangan pekerjaan langsung di perkebunan sebanyak 4,2 juta dan tidak langsung mencapai 12 juta orang. Bahkan kini sawit berkontribusi menggantikan bahan bakar fosil sebanyak 8,4 juta kiloliter. Melalui program B30, pada tahun 2020 mampu menghemat devisa sebanyak Rp 38 triliun.

Karena itu untuk mempertahankan produksi minyak sawit di dalam negeri, pemerintah sejak tahun 2017 menggelar program PSR. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, saat ini luas areal sawit mencapai 16,38 juta hektar (ha) dengan produksi 48 juta ton. Dari luasan lahan sawit rakyat sebanyak 6,94 juta ha.

"Dari luas perkebunan sawit rakyat tersebut yang mempunyai potensi untuk peremajaan sebanyak 2,8 juta ha dengan sebaran dominan berada di Sumatera dan Kalimantan," kata Bagus saat Webinar Mendorong

“SEJAK TAHUN 2019, CALON PESERTA PSR BISA MELALUI ONLINE MELALUI APLIKASI PSR ONLINE. JADI TIDAK PERLU MELAMPIRKAN FISIK DOKUMEN. “INI UPAYA KITA MEMPERCEPAT REALISASI PSR,”

Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat kerjasama Tabloid Sinar Tani dengan BDPKKS, Rabu (9/3).

Dari 2,8 juta ha kebun sawit rakyat, perinciannya lahan petani plasma dan swadaya 2,29 juta ha, plasma PIRBUN 0,14 juta ha dan PIR trans 0,37 juta ha. Luas kebun sawit yang menjadi target pemerintah tersebut berada di Sumatera 397.200 ha, Kalimantan 86.000 ha, Sulawesi 44.500 ha, Jawa 6.000 ha dan Papua 6.000 ha. Totalnya 540 ribu ha.

"Ini penyebaran lokasi sawit yang ditargetkan dilakukan peremajaan," ujarnya. Pemerintah telah menargetkan realisasi PSR tahun 2017 sebanyak 20.780 ha, tahun 2018 (185 ribu ha), tahun 2019 hingga 2021 masing-masing 180 ribu ha.

Namun diakui pelaksanaan PSR belum sesuai harapan. Misalnya tahun 2017 baru mencapai 13.206 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha), tahun 2021 (27.747 ha) dan tahun 2022 hingga kini baru 1.190 ha.

Guna mempermudah pelaksanaan PSR, Bagus mengatakan, pemerintah telah mempermudah persyaratan dan prosedur agar memberikan keleluasaan calon peserta PSR. Misalnya, jika selama periode 2017-2018 ada 14 syarat, maka tahun 2019 syaratnya dikurangi menjadi 8 syarat. Bahkan sejak tahun 2020 hanya 2 syarat yakni kelembagaan pekebun dan legalitas lahan.

Bukan hanya itu, dalam proses verifikasi juga kian dipercepat. Jika tahun 2017-2018 harus melalui tiga

kali verifikasi dari mulai tingkat daerah hingga pusat. Namun sejak tahun 2019, calon peserta PSR bisa melalui online melalui aplikasi PSR online. Jadi tidak perlu melampirkan fisik dokumen. "Ini upaya kita mempercepat realisasi PSR," ujarnya.

Dana PSR

Sementara itu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BDPKKS, Ahmad Munir mengatakan, dalam program PSR pihaknya membantu pendanaan bagi pertumbuhan sektor sawit, terutama peremajaan sawit. Jadi dana di BDPKKS dari pengumpulan dana untuk kegiatan belanja program, termasuk PSR.

"Program PSR ini merupakan kebijakan dan kewenangan Kementerian Pertanian. Disain pelaksanaan serta panduan pelaksanaan program ditetapkan Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022," katanya.

Diakui banyak manfaat dari PSR ini. Misalnya, sebagai strategi stabilisasi harga dalam mengurangi stok minyak sawit, sehingga mendorong peningkatan harga CPO termasuk TBS (tandan buah segar). Selain itu, meningkatkan produktivitas seiring dengan peningkatan komposisi tanaman produktif, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

Karena itu dalam pengusulan PSR, BDPKKS membuat aplikasi PSR online dan Smart PSR untuk mempercepat usulan PSR dari pekebun. "Jadi jika biasanya pekebun harus menandatangani PKS, sekarang kami sosialisasikan PSR online dan Smart PSR untuk mempermudah PSR. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa mencapai target 180 ribu ha," tuturnya.

Sebagai upaya percepatan PSR melalui kemitraan dengan perusahaan inti seperti yang digagas Kementerian Pertanian, Munir mengatakan, pihaknya akan mencoba membuat pola dan menuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. "Saat ini lagi kita proses untuk membuat pola kemitraan mudah-mudahan cepat selesai. Selanjutnya nanti ada peraturan Dirut BDPKKS untuk pola kemitraan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Ratnawati Nurkhoiry mengatakan, setidaknya ada

empat titik kritis PSR. Pertama, kesiapan pekebun. Bagaimana pemerintah memberikan jaminan pendapatan kepada petani selama masa TBM (tandan buah menghasilkan).

"Ini menjadi kendala. Kalau pekebun mempunyai beberapa lahan, mungkin bisa gantian melakukan peremajaan. Tapi kalau hanya punya 1 lahan, mereka mungkin harus mempertimbangkan kembali untuk meremajakan tanaman," tuturnya.

Kedua, ketersediaan bahan tanaman/bibit unggul untuk menjamin peningkatan produktivitas tanaman. Ketiga, kesiapan kelembagaan pekebun. Kelembagaan pekebun akan meningkatkan posisi tawar dan akses terhadap sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil.

Keempat, kemitraan dalam proses peremajaan, akses sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil. "Titik-titik kritis ini harus menjadi perhatian. Apalagi saat ini harga rata-rata TBS masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadikan pekebun cenderung menahan untuk peremajaan. Jadi perlu jaminan pendapatan pengganti selama masa TBM disaat pekebun memutuskan untuk peremajaan," tuturnya.

Bagaimana kesiapan petani/pekebun sawit? Masalah utama menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, lahan calon PSR cenderung terkendala dalam kawasan hutan. Padahal banyak petani telah memiliki umur tanaman 25 tahun lebih. "Hampir 84 persen gagal usul," ujarnya.

Kendala lain, minimnya informasi PSR kepada petani yang menganggap dana hibah menjadi pinjaman yang wajib dikembalikan. Selain itu, konfirmasi administrator akun yang cukup lama, khususnya melalui dari disbud Kab/Kota. "Pihak bank cenderung tidak paham program pola PSR, sehingga hanya mau menjadi fungsi penyalur dana hibah saja," katanya.

Karena itu Gulat mengusulkan perlu adanya paradigma baru PSR yakni, petani PSR harus menjadi operator, bukan sebagai objek. Permentan 03 tahun 2022, jangan meninggalkan petani mandiri (non-mitra). Sawit eksisting tertanam untuk PSR harus tol-clear untuk PSR sesuai dengan UU Cipta Kerja. "Biaya PSR per hektar harus dinaikkan dan PSR harus sepaket dengan ISPO," katanya. **Yul**



Strategi Mendongkrak Realisasi PSR

Upaya pemerintah membantu petani/pekebun memperbaiki tanaman sawit ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Meski disediakan dana bantuan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) realisasi masih cukup rendah.



Belajar dari pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang berjalan sejak tahun 2017, pemerintah pun menyiapkan strategi khusus untuk mendongkrak realisasi PSR. Bukan hanya mempermudah persyaratan bagi pekebun yang akan ikut bagian dalam program tersebut, tetapi jalur pengusulan dipangkas. Bahkan mulai tahun ini, pemerintah membuka jalur kemitraan.

Dengan strategi tersebut diharapkan realisasi PSR akan terus bertambah luas dan targetnya bisa tercapai. Data Ditjen Perkebunan, potensi PSR dari jumlah luas sawit rakyat sebanyak 6,94 juta ha dari total 16,38 juta ha. Dari luas perkebunan sawit rakyat yang mempunyai potensi untuk peremajaan sebanyak 2,8 juta

ha, plasma dan swadaya 2,29 juta ha, Plasma Pirbun 0,14 juta ha dan PIR trans 0,37 juta ha.

Luas kebun sawit yang menjadi target pemerintah tersebut berada di Sumatera 397.200 ha, Kalimantan 86.000 ha, Sulawesi 44.500 ha, Jawa 6.000 ha dan Papua 6.000 ha. Dengan demikian totalnya 540 ribu ha. Dalam pelaksanaan PSR, pemerintah melakukan bertahap. Target PSR tahun 2017 sebanyak 20.780 ha, tahun 2018 (185 ribu ha), tahun 2019 hingga 2021 masing-masing 180 ribu ha.

Namun dalam pelaksanaan PSR belum sepenuhnya sesuai harapan. Misalnya, tahun 2017 baru mencapai 13.206 ha, tahun 2018 (35.198 ha), tahun 2019 (88.339 ha), tahun 2020 (92.066 ha), tahun 2021 (27.747 ha) dan tahun 2022 hingga kini baru 1.190 ha.

Prosedur Lebih Sempel

Nah, guna mempermudah pelaksanaan PSR, pemerintah telah mensimpelkan persyaratan dan prosedur agar memberikan keleluasaan calon peserta PSR. "Jika selama periode 2017-2018 ada 14 syarat, maka tahun 2019 syaratnya dikurangi menjadi 8 syarat. Bahkan sejak tahun 2020 hanya 2 syarat yakni kelembagaan pekebun dan legalitas lahan," kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro.

Bukan hanya itu, dalam proses verifikasi juga kian dipercepat. Jika tahun 2017-2018 harus melalui tiga kali verifikasi dan berjenjang dari mulai tingkat daerah hingga pusat. Selanjutnya pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penelahaan persyaratan dan kemudian mencairkan anggaran.

"Kalau masih belum lengkap dikembalikan pengusul, tapi kalau sudah disetujui balik ke kabupaten. Ini tentu memberikan waktu cukup lama," katanya dalam Webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDPKS di Jakarta, Rabu (9/3).

Namun sejak tahun 2019, semua persyaratan tidak perlu memberikan dokumen dalam bentuk fisik, tapi calon peserta PSR bisa menginput persyaratan tersebut melalui online dengan aplikasi PSR online. "Ini upaya kita mempercepat realisasi PSR,"

ujarnya.

Bahkan proses verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, terkait legalitas pekebun dan status lahan hanya di tingkat kabupaten. Setelah verifikasi, langsung diterbitkan SK CPCL oleh bupati atau kepala dinas sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis.

Kemudahan lainnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 03 Tahun 2022 yang membuka kesempatan bagi calon peserta mengusulkan lahan seluas 4 hektar (ha) per orang, baik melalui jalur dinas maupun kemitraan.

Sebelumnya berdasarkan Permentan 07 Tahun 2019, calon peserta PSR hanya bisa mengajukan luas lahan 4 hektar (ha) per kepala keluarga (KK). "Itu artinya jika satu keluarga memiliki lahan lebih dari 4 ha, maka bisa mengajukan lahan yang lain," katanya.

Bagus mengungkapkan, strategi lain mempercepat PSR adalah dengan mendorong percepatan pelaksanaan perjanjian tiga pihak yakni BPDPKS-Bank-Petani. Selain itu juga percepatan transfer biaya BPDPKS bagi petani yang sudah disetujui. "Kami mengharapkan juga dukungan ATR/BPN dan KLHK dalam membantu *screening* usulan calon rekomtek," tambahnya.

Yul

Kemitraan, Jalur Baru PSR

Kementerian Pertanian membuka jalur kemitraan untuk pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan jalur ini, petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) bisa mengajukan rencana PSR langsung ke Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro mengatakan, dalam peraturan yang lalu, setiap usulan PSR dari petani atau Gapoktan harus diverifikasi dinas pertanian kabupaten, kemudian ke provinsi, lalu ke Ditjen Perkebunan yang kemudian menerbitkan rekomendasi teknis yang diberikan ke BPDPKS.

Namun kini dengan terbitkan Permentan No. 03 tahun 2022, selain usulan bisa melalui aplikasi PSR online, petani/pekebun bisa melalui jalur kemitraan. "Sekarang dibuka jalur lain, bisa melalui kemitraan usaha. Ini nanti petani pengusul melalui Gapoktan langsung ke BPDPKS," kata Bagus.

Namun demikian lanjut Bagus, usulan tersebut harus bekerjasama dengan perusahaan perkebunan sawit. Nantinya, perusahaan tersebut menjembatani dan mengkoordinasikan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengusulan PSR. Peran perusahaan juga membuat perjanjian kerjasama dengan

kemitraan.

"Usulan tersebut langsung ke BPDPKS untuk diverifikasi, tidak lagi lewat dinas dan Ditjen Perkebunan," katanya. Dengan cara ini perusahaan juga diharapkan ikut andil dalam percepatan peremajaan sawit, tambah Bagus saat Webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDPKS di Jakarta, Rabu (9/3).

Untuk verifikasi, BPDPKS nanti menunjuk surveyor untuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Verifikasi meliputi, kriteria perusahaan perkebunan, perjanjian kerjasama perusahaan dan kelembagaan pekebun, legalitas perkebun dan kelembagaan pekebun, serta

legalitas dan status lahan. Nah, setelah verifikasi diterbitkan Surat Keputusan (SK) Dirut BPDPKS sebagai penerima dana PSR.

Dikatakan, kemitraan juga bisa dilakukan antara Gapoktan dengan produsen pupuk. Karena itu saat ini, pemerintah mendorong terbentuknya kelembagaan petani, bukan hanya yang bersifat teknis tapi juga ekonomis yang berbadan hukum agar bisa bekerjasama dengan berbagai pihak.

"Dengan jalur ini kita harapkan akan mempercepat target peremajaan yang saat ini masih jauh dari harapan 180 ribu ha/tahun," katanya. Bagus juga berharap kemitraan petani dan perusahaan ini saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. **Yul**

Dukungan Dana BPDPKS untuk Akselerasi PSR



Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu program strategis sektor perkebunan yang sedang pemerintah dorong percepatannya. Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman serta menjaga luasan lahan kebun sawit berkelanjutan secara legal.

Dalam pelaksanaan PSR keperluan modal bagi petani menjadi yang utama. Apalagi petani juga nantinya harus menunggu setidaknya hingga 5 tahun untuk bisa panen kembali. Karena itulah, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan bantuan dana yang sifatnya gratis untuk petani.

Penyaluran dana untuk mendukung PSR merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada BPDPKS dalam pengembangan industri sawit, khususnya dibagian hulu. Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Luran Crude Palm Oil BPDPKS, Ahmad Munir menyampaikan, dalam kurun waktu 2016 hingga akhir Desember 2021, realisasi penyaluran dana PPKS (Pembiayaan Program Kelapa Sawit) sebesar Rp 6,603 triliun. Cakupan lahan yang diremajakan mencapai 242.906 ha dengan jumlah pekebun sebanyak 105.684 orang.

Sumatera Selatan menjadi provinsi paling tinggi menerima dana PPKS yaitu sebesar Rp 1,276 triliun dengan luas lahan 47.369 ha dengan jumlah pekebun sebanyak 19.675 orang. Program PSR tahun 2020 - 2022 ini menasar 21 Provinsi dan 106 Kabupaten/Kota dengan target luasan 540.000 ha. Sedangkan potensi peremajaan untuk perkebunan Inti Rakyat (PIR) sebanyak 500.000 ha.

Dalam prosesnya, BPDPKS menyalurkan dana tersebut melalui program yang di desain Kementerian Pertanian. "Karena itu keberhasilan penyaluran tersebut sangat bergantung pada disain dan implementasi program tersebut dilapangan," kata Munir saat Webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat kerjasama Tabloid Sinar Tani dengan BPDPKS, Rabu (9/3).

Munir menilai ada beberapa keuntungan program PSR. Pertama, menjadi salah satu solusi jitu bagi pekebun untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawitnya hingga 10 ton tandan buah segar/ha/tahun dengan kepadatan tanaman kurang lebih 80 pohon/ha.

Kedua, pekebun mendapatkan kepastian dari sisi aspek legalitas lahan usaha karena menjadi syarat utama. Hal ini akan mengurangi resiko pembukaan lahan secara ilegal yang akan berdampak serius secara hukum.

"Nantinya pekebun juga akan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ketika melakukan panen perdana untuk memastikan prinsip keberlanjutan," kata Ahmad Munir.

Skema Pembiayaan

Karena biaya PSR memang lumayan besar yaitu diangka Rp 60 - 70 jutaan/ha, sedangkan bantuan yang disiapkan BPDPKS hanya di angka Rp 30 juta/ha, diperlukan tambahan pembiayaan dari pekebun sendiri dan lembaga keuangan lain.



Rampingkan Syarat

Pemerintah kata Munir juga merampingkan syarat pengajuan usulan PSR menjadi dua syarat. Pertama, legalitas lahan. Kedua, kelembagaan pekebun dalam bentuk Poktan, Gapoktan, Koperasi maupun Kelembagaan Ekonomi lainnya.

Bagi pekebun yang bergabung dalam kelompok paling sedikit terdiri dari 20 pekebun atau memiliki lahan sekurang-kurangnya 50 ha/kelompok. Selain itu, jarak antar kebun paling jauh 10 km yang dilengkapi dengan peta berkoordinat.

Sebagai pelengkap syarat kelembagaan pekebun, Munir

Dokumen Pendukung Calon Peserta PSR

1. Surat kuasa pekebun kepada ketua Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi lainnya.
2. Surat tanda daftar usaha perkebunan untuk Budidaya (STD-B) atau surat kesanggupan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk penerbitannya.
3. Surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja.
5. Surat pernyataan umur tanaman/produktivitas dan asal benih.
6. Surat ketersediaan benih.
7. Surat kemitraan kerja
8. Perjanjian kemitraan kerja
9. Surat pernyataan teknik peremajaan
10. Surat pernyataan kesediaan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya untuk pembiayaan tahap lanjutan (indicative offering letter).

Munir mengatakan, ada tiga skema pembiayaan yang sekarang ini pemerintah siapkan. Pertama, bantuan BPDPKS Rp 30 juta ditambah tabungan pribadi pekebun. Kedua, bantuan BPDPKS Rp 30 juta dikombinasikan dengan pendanaan dari lembaga keuangan. Ketiga, akumulasi antara bantuan BPDPKS Rp 30 juta ditambah tabungan pekebun plus pendanaan lembaga keuangan.

Untuk mempermudah pekebun melaksanakan PSR, Munir mengatakan, kini usulan bisa melalui aplikasi PSR online dan Smart PSR. Jadi jika biasanya pekebun harus menandatangani PKS, maka kini bisa melalui PSR online dan Smart PSR. "Ini untuk mempermudah PSR. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa mencapai target 180 ribu ha," ujarnya.

Guna mempercepat realisasi PSR, pemerintah melalui Kementerian Pertanian kini mengembangkan pola kemitraan dengan perusahaan inti. Bentuk kemitraan ini bentuknya kombinasi antara inti-plasma, kemudian perusahaan negara/swastawadaya. "Keunggulannya model kemitraan ini, pihak bank tidak melakukan pemeriksaan atau verifikasi dokumen ulang," katanya.

mengatakan, calon peserta PSR perlu melampirkan dokumen antara lain KTP dan KK/Surat Keterangan Kependudukan. "Tambahan lainnya adalah legalitas dan susunan pengurusan Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi pekebun," katanya.

Untuk syarat legalitas lahan, lanjut Munir, pengusul harus menyediakan peta berkoordinat, nomor rekening pekebun dan lembaga pengusul, dan yang paling penting melampirkan SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB, hak adat (komunal) atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya.

Untuk mencapai keberhasilan peremajaan, selain 2 persyaratan yang harus dipenuhi perlu disiapkan berbagai dokumen untuk mendukung pelaksanaannya. "Nantinya dokumen-dokumen pendukung tersebut akan diunggah setelah rekomendasi teknik terbit," ujarnya.

Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah berharap program PSR berjalan dengan baik dan memperluas cakupan.

Iqbal/Yul

Eligibilitas Kebun PSR

Meski berbagai kemudahan telah pemerintah berikan, kebun sawit rakyat yang akan diremajakan harus memenuhi eligibilitas alias kelayakan. Apa saja?

1. Peremajaan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.
2. Peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh Pekebun dengan luasan maksimal 4 Ha/orang.
3. Pekebun tergabung ke dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan.
4. Status lahan tidak berada di dalam kawasan hutan dan lindung gambut serta tidak berada di lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU).
5. Peremajaan dilakukan dengan kriteria yakni, tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun; produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/Ha/Tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan kebun yang menggunakan benih tidak unggul.



Sebagai salah satu produsen benih, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah memproduksi benih sawit unggul berstandar Internasional sesuai 'Sistem Manajemen Mutu' (ISO 9001:2008). "Bahan tanam kelapa sawit unggul merupakan modal utama untuk mendapatkan produktivitas tinggi," kata Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Ratnawati Nurkhoiry saat webinar "Mendorong Realisasi PSR" yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rabu (9/3).

Dengan bahan tanam unggul Ratna yakin, produksi

Benih Unggul Kunci Keberhasilan PSR

Salah satu faktor utama keberhasilan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah benih. Sebagai tanaman tahunan yang baru bisa terlihat hasilnya dalam jangka waktu lama, keberadaan benih unggul menjadi penting diperhatikan bagi petani.

Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak (CPO) jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan bibit dari benih asalan. Bahan tanam unggul berupa kecambah, bibit klon serta bibit komersial kelapa sawit siap tanam telah dirilis PPKS.

Sebagai Sumber Benih Unggul Utama, PPKS telah mendistribusikan bahan tanaman sawit unggulan. Berdasarkan pengguna, bahan tanaman unggul PPKS 73,39% sudah ditanam pekebun rakyat. "Dari banyaknya benih unggul tersebut, varietas Simalungun paling tinggi yang digunakan petani mencapai 40,37%," katanya.

Hingga Februari 2022, stok bibit PPKS sampai Februari 2022 dari 13 unit kebun (Sei Aek, Pancur, Bukit Sentang, Parindu, Sei Lilin, Dawas, Kasongan, Kalianta, Dalu-Dalu, Padang Mandarsah, Simirik, Teluk Dalam, Marihat, Sarolangun) cukup untuk areal 18,7 ribu ha. Tahun 2021, PPKS telah menyalurkan 1,07 juta bibit siap tanam.

"Dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul PPKS membuka program mitra penangkar yang membeli kecambah dan menjual dalam bentuk bibit kepada masyarakat," tuturnya.

Titik Kritis

Pada kesempatan tersebut, Ratna mengingatkan, setidaknya ada empat titik kritis yang menjadi faktor realisasi PSR. Mulai dari kesiapan pekebun, kesiapan bahan tanaman unggul, kesiapan kelembagaan pekebun dan kemitraan. "Titik kritis sebenarnya kesiapan dari pekebun itu sendiri. Apakah siap atau tidak untuk melakukan peremajaan," katanya.

Meski ada dana peremajaan, namun Ratna menegaskan, apakah ada dana pendamping untuk pekebun, kemudahan akses dana hingga pendampingan kultur teknis tanaman intercropping untuk mendapatkan jaminan pendapatan selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

"Keragu-raguan siap tidaknya pekebun rakyat ini umumnya terjadi pada pekebun dengan luasan kurang dari 2 ha," ujarnya.

Di sisi lain, kesiapan bahan tanaman unggul untuk menjadi bibit sawit PSR harus diperhatikan. Saat ini gap produktivitas antara pekebun rakyat dan perusahaan besar dari hasil CPO cukup tinggi. Karena itu, program PSR ini harus diintensifkan dengan bibit sawit unggul.

Titik kritis lainnya adalah kesiapan kelembagaan pekebun. Kelembagaan ini untuk meningkatkan posisi tawar terhadap sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil. Kemitraan dalam proses peremajaan, akses sarana produksi, pendanaan dan pemasaran hasil juga menjadi titik kritis realisasi PSR ini. "Kemitraan ini dibutuhkan sampai pemasaran hasil pekebun itu sendiri," tuturnya.

Gsh/Yul

Asa Petani Sawit kepada Pemerintah

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah salah satu komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani sawit. Namun masih banyak hambatan dan kendala dalam merealisasikan PSR sehingga target yang sudah ditetapkan belum tercapai.

Tidak bisa dipungkiri, perkembangan kebun sawit rakyat dari masa ke masa terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan hanya luasan yang terus bertambah, geliat petani dalam menanam sawit juga semakin menunjukkan hal yang positif.

Luas kebun sawit rakyat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 1980 hanya 2% dari total luas kebun sawit nasional, maka pada tahun 2018 meningkat drastis mencapai 6,94 juta ha atau sekitar 41% dari 16,28 juta ha.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, saat webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang diadakan Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDPKS, Rabu (9/3) mengakui, PSR yang diluncurkan sejak tahun 2017 ini merupakan program pemerintah dalam mendukung petani sawit untuk memperbaharui perkebunan

sawit dengan tanaman yang lebih berkualitas.

Sayangnya, realisasi PSR tidak berjalan mulus. Hal tersebut bisa dilihat dari pencapaian/realisasi tiap tahunnya. Seperti pada tahun 2017 realisasi PSR seluas 13.260 ha, 2018 seluas 36.196 ha, pada tahun 2019 mencapai 88.339 ha, pada tahun 2020 seluas 91.523 ha dan pencapaian realisasi tahun 2021 seluas 27.262 ha.

Tantangan PSR

Realisasi PSR tersebut menghadapi berbagai tantangan sehingga lambat, mulai dari birokrasi, sosialisasi dan pendampingan, legalitas lahan, perencanaan kerja dan laporan pertanggung jawaban, akses bibit yang sulit, serta harga saprodi yang terus naik, kemitraan dan dana tambahan serta pemeriksaan aparat hukum.

"Dari berbagai kendala tersebut kami memfokuskan pada legalitas lahan. Hampir 84% kami gagal di level yang paling rendah pengusulan kabupaten karena terindikasi dalam kawasan hutan. Yang kedua akses bibit sulit, karena

ketersediaan akses bibit pada saat akan replanting," tuturnya.

Dari masukan petani sawit rakyat yang tergabung dalam Apkasindo, Gulat mencatat ada berbagai hal yang menghambat PSR. Paling utama adalah masalah lahan calon PSR yang berada dalam kawasan hutan, meskipun telah memiliki umur tanaman 25 tahun lebih (84% gagal usul).

Gulat mencontohkan, beberapa studi kasus permasalahan lahan yang dialami petani sawit salah satunya KUD Raharja Tani Jaya. Petani yang transmigran sejak tahun 1986 dan sudah memiliki SHM sejak tahun 1991 pada lahan seluas 255,82 ha. Namun berdasarkan overlay kawasan hutan, ternyata lahan sawit petani anggota KUD Raharja Tani Jaya masuk dalam kawasan areal Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 239,89 ha atau hampir 93,77%.

Kasus serupa juga terjadi pada KUD Tiga Koto dengan lahan seluas 2.501,15 ha milik petani plasma yang sudah memiliki SHM sejak tahun 1999-2005. Namun berdasarkan overlay kawasan hutan, lahan sawit petani anggota KUD Tiga Koto



masuk dalam kawasan areal Hutan Produksi Konversi (HPK) 2.501,15 Ha (SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016).

Bila legalitas sawit rakyat tidak segera diselesaikan, Gulat mengkhawatirkan akan adanya resiko yang akan dihadapi Indonesia. Salah satunya, kehilangan 35% produksi minyak sawit, ekspor minyak sawit, devisa sawit, pajak dan dana sawit.

Karena itu, Gulat mengusulkan paradigma baru PSR. Diantaranya menjadikan petani PSR sebagai operator bukan hanya sekedar objek. Sesuai Permentan No 03/2022 jangan meninggalkan petani mandiri (non mitra). Sawit eksisting tertanam untuk PSR harus Tol-Clear untuk PSR sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. "Biaya PSR/Ha harus dinaikkan dan PSR harus sepaket dengan ISPO," tambahnya. Herman/Yul



Petani Sawit, Masalah dan Solusinya

Oleh : Wayan Supadno*)

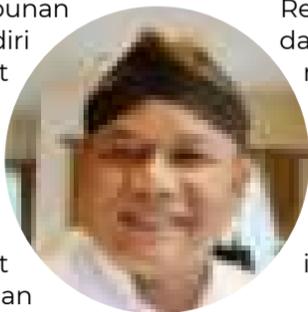
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri 2015. Kelahirannya sangat disyukuri oleh petani sawit. Strateginya sukses mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) di petani. Dulu Rp 1.200 saat ini Rp 3.500/kg TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Banyak putra putri petani dapat beasiswa, kemudian ada peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan manfaat lainnya.

Terdata dari Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, luasan kebun sawit milik petani rakyat adalah 6,8 juta ha dari total luas sawit 16,38 juta ha (Ditjenbun). Totalnya berarti setara dengan 41,5%, dimiliki oleh jutaan Kepala Keluarga Petani. Baik itu yang plasma atau swadaya mandiri. Bagi Lilin-lilin kecil menerangi Ibu Pertiwi, sawit rakyat berkontribusi nyata untuk bangsa.

Namun hingga sekarang, masih banyak permasalahan serius yang dihadapi petani. Berdasarkan skala prioritas, ada seluas 2,4 juta ha lahan sawit rakyat yang dianggap masuk kawasan kehutanan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini artinya lahan sawit rakyat tersebut dianggap ilegal. Itu akibat ketidaktahuannya petani.

Buktinya banyak yang sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan banyak yang sudah berdiri bangunan rumah penduduk, sekolah, kantor desa dan lainnya. Karena asalnya sebagian program transmigrasi. Selain itu juga masih ada yang tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.

Disisilain, produktivitas per hektar lahan kebun rakyat ini masih paling rendah dibandingkan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), apalagi dibanding milik swasta besar baik Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).



Rendahnya produktivitas ini terlihat dari wujud Tandan Buah Segar (TBS) maupun rendemen *crude palm oil* (CPO). Rendahnya produktivitas ini berdampak pada nilai jelek indeks produktivitas sawit Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktahuannya petani sawit dalam menanam benih ilegal.

Di sisi lain, berdasarkan laporan BPDPKS dihadapan Komisi IV DPR RI, BPDPKS sejak 2015 s/d 2021 telah mengumpulkan pungutan ekspor sebanyak Rp 136 triliun. Khusus tahun 2021 Rp 71 triliun. BPDPKS juga telah menyalurkan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), meskipun baru Rp 6,6 triliun dengan seleksi ekstra ketat terkait status lahan dan syarat lainnya. Setara 4,6% padahal kontribusinya 41,5% atau 6,8 juta ha dari total luas kebun 16,38 juta ha. Untuk itu, karena bangsa ini lahir dari rakyat dan demi rakyat sesuai amanah Kemerdekaan Indonesia, 77 tahun silam. Sudah seharusnya lebih dewasa bijak cerdas menyikapinya. Masalahnya sudah diketahui, lahan yang justru disengketakan oleh Negara (Pemerintah/Kemen KLHK) dan tanpa dapat benih hasil riset di Puslit yang kesemuanya milik negara, operasionalnya dari pajak rakyat (petani sawit).

Kalkulasi logisnya, andaikan BPDPKS mengalokasikan Rp 1 triliun saja dari Rp 136 triliun yang dipungut selama ini. Dibeli benih asli ke PPKS Medan setara dapat minimal 100 juta butir kecambah. Bisa untuk petani seluas 660.000 ha. Lalu digratiskan dimanapun sentra sawit rakyat. Niscaya akan jadi perubahan besar jangka panjang potret sawit Indonesia utamanya petaninya. Petani juga kembali menikmati kesejahteraannya dari hasilnya yang dipungut untuk ekspor.

*) Anggota Dewan Pakar Sawit (Apkasindo)



Oleh: Memed Gunawan



Meremajakan Sawit, Bukan Mendandani Sawit yang Sudah Uzur

Dalam perjalanan hidup semua makhluk, kondisi fisik dan kemampuan memproduksi selalu membentuk kurva yang sama. Mulai dari nol, perlahan naik lalu meningkat dengan cepat, kemudian melandai sampai pada titik puncak sesudah itu menurun dan akhirnya berhenti. Mati. Itulah yang sedang terjadi di perkebunan sawit rakyat. Umur tanamannya sudah tua sehingga produksinya rendah dan dalam proses terus menurun.

Masalahnya adalah, hampir semua perkebunan rakyat minim upaya peremajaan. Sebut saja yang namanya karet, kopi, cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Banyak yang hanya menikmati rezeki warisan. Nah, kelapa sawit rakyat juga demikian. Padahal Kebun sawit rakyat yang saat ini luasnya mencapai 6,2 juta hektar, atau sekitar 47 persen dari luas total kebun sawit di Indonesia, sudah banyak yang berumur tua. Bahkan dalam proses menuju kematian.

Kemampuan ekonomi pekebun rakyat hampir tidak memungkinkan untuk meremajakan kebunnya tanpa bantuan pihak lain. Menebang, membeli bibit baru, menanam dan menunggu sampai tanaman baru memberikan hasil itu sangat berbiaya. Mereka perlu bantuan. Kali ini petani sawit rakyat dibantu pemerintah dalam bentuk hibah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk meremajakan kebunnya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR.

Perjalanannya sejak 2018 sampai sekarang memang berjalan lambat. Sasaran peremajaan seluas 540.000 hektar dengan target tahunan 180.000 hektar selama tahun 2018-2022 hanya mencapai 19,02 persen (2018), 49,08 persen (2019), 51,15 persen (2020), 15,41 persen (2021). Banyak kendala yang ditengarai akibat persyaratan yang terlalu berat, sehingga akhirnya disederhanakan menjadi hanya dua persyaratan, yaitu status lahan dan kelembagaan petani. Tapi menurut Dr Gulat Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, ini masih merupakan persyaratan yang sulit dipenuhi.

Kita semua mengerti bahwa PSR sangat penting tetapi tidak mudah melaksanakannya. Karena mencakup areal yang luas, jumlah petani yang besar, manajemen yang rumit, penggunaan dana yang besar dan pelaksanaan di lapangan yang sulit sehingga memerlukan energi yang besar pula.

Sawit mempunyai potensi yang tinggi dan berperan besar dalam upaya pengembangan pusat perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap PDB, dukungan terhadap kegiatan ekonomi hilir terkait, sumber pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Meremajakan dan membuat sesuatu dari awal pasti tidak sederhana, jauh lebih sulit dibanding dengan mendandani yang sudah ada. Tapi mendandani yang sudah uzur, tidak berpotensi memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, betapa pun rumitnya, harus dicari jalan keluar agar program ini dapat dilaksanakan-meniru teks proklamasi- dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Semoga dana yang dipungut dari pelaku usaha sawit (termasuk sawit rakyat) itu dapat dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program yang efektif dalam jumlah yang berlipat ganda sehingga menghasilkan manfaat yang terus bergulir bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Aamiin.

KUR Taksi Alsintan Mengucur di Jawa Timur



Pemerintah terus menggenjot modernisasi pertanian melalui penerapan mekanisasi di tingkat petani. Salah satu yang kini digerakkan adalah Taksi Alsintan (Alat Mesin Pertanian). Bahkan Kementerian Pertanian terus aktif mengajak petani dan pelaku usaha pertanian ikut dalam program tersebut.

Untuk membantu petani dan pelaku usaha memperoleh alsintan, pemerintah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di awal tahun 2022 ini, Kementan telah mengucurkan KUR Taksi Alsintan di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, terakhir di Jawa Timur.

Tujuannya agar masyarakat mampu mengadakan alsintan secara mandiri, sehingga tidak lagi tertuju pada bantuan pemerintah melalui APBN. Direktur Alsintan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, pergerakan program Taksi Alsintan ini telah dimulai dari awal tahun dan sampai akhir Maret ini untuk difokuskan pada wilayah dengan zona hijau.

Zona hijau ini merupakan wilayah yang potensial dan daerah sentra utama produksi padi nasional. "Kami optimis program KUR Taksi Alsintan ini akan berjalan sukses setelah melihat makin banyak petani yang bersemangat untuk melakukan pembelian sendiri. Ini patut kita syukuri," kata Nur Alam.

Pernyataan Nur Alam disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemanfaatan Pengembangan Program Taksi Alsintan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, Lamongan, Selasa (8/3).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan se-Provinsi Jawa Timur, diantaranya Ngawi, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro dan Tuban. Kemudian perwakilan Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) wilayah Jawa Timur, serta penyedia traktor Roda Empat dan *Combine Harvester*.

Dalam rapat koordinasi ini, juga dilakukan penyerahan alsintan

kegiatan pengembangan program Taksi Alsintan yang diperoleh melalui KUR kerjasama BNI dan BRI dengan PT Corin Mulia Gemilang. Alsintan yang diserahkan berupa *Combine Harvester* sebanyak 6 unit dan traktor roda empat tipe crawler 1 unit kepada petani penerima KUR Alsintan dari Kabupaten Lamongan, Ponorogo, dan Madiun.

DP KUR Alsintan

Nur Alam bersyukur sejumlah problem dalam proses penyaluran KUR Taksi Alsintan ini bisa mulai teratasi, sehingga para petani bisa langsung mendapatkan alsintan yang dikehendakinya. Utamanya terkait uang muka atau DP (*down payment*) KUR Alsintan.

Kini kata Nur Alam, perusahaan penyedia alsintan telah bersedia memberikan insentif keringanan berupa uang muka 20 persen. Sebelumnya petani terbebani DP 30 persen. "Petani kini cukup membayar ke bank penyedia KUR sebesar 10 persen," ujarnya.

Ia menilai, kemauan perusahaan membantu petani dalam menyediakan uang muka menunjukkan sudah ada sinergitas yang baik antara semua stakeholders untuk menyukseskan program Taksi Alsintan ini. Karena itu, Nur Alam menghimbau kepada penyedia alsintan yang lain untuk bekerja sama mendukung program Taksi Alsintan. Terutama dengan pemberian jasa kredit pembelian alsintan dengan DP maksimal 20 persen dan penyediaan spare part.

Jebolan Teknik Pertanian Universitas Gajah Mada ini menegaskan, program Taksi Alsintan ini merupakan ide Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memastikan mekanisasi ini terus berlanjut dan tidak berhenti

hanya karena persoalan anggaran. Harapannya pertanian bisa lebih maju, mandiri dan modern.

"Saya yakin program ini bisa berhasil, karena tanpa kita dorong petani sudah mulai merasakan bahwa alsintan ini sangat kita butuhkan. Ini yang terjadi di Jawa Timur," terang Nur Alam.

Karena itu, Nur Alam berharap dengan mekanisasi pertanian ini, petani di Jawa Timur, khususnya Lamongan dan sekitarnya terus terpacu untuk berproduksi. Dengan demikian, petani bisa memaksimalkan lahannya untuk IP-400, yakni tanam dan panen empat kali dalam setahun. "Dengan alsintan, pertanian semakin efisien, Inshaa Allah bisa panen dan tanam empat kali dalam setahun," katanya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pertanian, Ditjen PSP, Indah Megahwati meminta pihak perbankan memudahkan persyaratan untuk KUR Alsintan. Sebab aturan yang ada saat ini terbilang cukup berat, terutama terkait uang muka yang dikenakan bank sebesar 30 persen.

"Masalah krusial soal DP dan agunan ini memang alot dibahas bersama Himbara," kata Indah. Namun ia menegaskan persoalan DP dan agunan ini memang sangat terkait dengan 'trust'. Sebab bank berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet.

Namun demikian, Indah sudah meminta bank tidak perlu khawatir terhadap pinjaman KUR alsintan. Pengalaman selama ini, sangat jarang terjadi kredit macet untuk

KUR di pertanian. "Program (Taksi Alsintan) yang sedang dijalankan ini sebenarnya bukan program baru, tapi masalah trust perbankan. Mau menyalurkan, tapi tidak ada kredit macet," katanya.

Indah mengakui, dalam kebijakan perbankan memang ada aturan mengenai adanya agunan untuk kredit diatas Rp 100 juta. Sementara harga untuk *combine harvester* yang paling diminati petani harganya berkisar Rp 450 juta.

Karena itu Indah mendorong lahirnya regulasi yang bisa lebih mempermudah petani dalam mengakses KUR Alsintan. "Saat ini kita masih menggunakan KUR biasa, nah mudah-mudahan secepatnya ini ada KUR Taksi Alsintan ini sehingga DP, misalnya cukup 20 persen atau 10 persen," jelasnya.

Gandeng Penyedia Alsintan dan Perbankan

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lamongan, Sukriyah menegaskan, dalam program Taksi Alsintan, Sukriyah menuturkan, pihaknya juga telah bekerjasama dengan salah satu penyedia alsintan dalam program KUR Taksi Alsintan.

Dalam proses ini, pihaknya bersama penyedia alsintan telah bermitra dengan BNI dan BRI guna membantu poktan atau gapoktan yang membutuhkan alsintan. Khususnya *combine harvester* dan traktor dalam mendukung kegiatan pengembangan IP-400.

Sukriyah mengakui, pentingnya dukungan alsintan untuk efisiensi dan peningkatan produksi petani di wilayahnya. Lamongan merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Timur dengan luas lahan 88 ribu ha dengan produksi mencapai 1,1 juta ton/tahun dan produktivitas sebesar 7,5 ton/ha. Sebagian petaninya pun sudah mulai menerapkan IP-400.

"Poktan dan gapoktan sudah bermitra dengan pengelola BUMDes dalam pengelolaan alsintan dengan sewa alat atau pinjam pakai," katanya. Adanya Taksi Alsintan ini akan memacu petani untuk bisa tanam dan panen empat kali dalam setahun sehingga produksi pertanian di Lamongan naik, kesejahteraan petaninya juga meningkat, tambah Sukriyah.

Yul/Ditjen PSP



info PSP

Strategi Amankan Produksi Kedelai Optimalkan Lahan dan Tingkatkan Produktivitas

Gejolak harga kedelai yang terjadi akhir-akhir ini membuat pengrajin industri tahu dan tempe meradang. Harga kedelai meningkat tajam dari sebelumnya hanya berkisar Rp 7.000-9.000/kg menjadi Rp 11.300/kg di Jawa. Bahkan di luar Jawa mencapai Rp 12.500/kg.

Pengembangan kedelai di Indonesia memang menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan pemerintah. Tahun ini, Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kedelai seluas 52 ribu hektar (ha) yang tersebar di 16 provinsi.

Daerah tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalsel, Sulteng, Sultra, dan Sulbar.

Penanaman kedelai seluas 52 ribu ha nantinya akan menghasilkan 30 ribu ton benih. Dengan produktivitas yang diharapkan mencapai 1,7 ton/ha, total kedelai yang dihasilkan pada tahun 2022 mencapai 1.040.000 ton.

Dr. Tri Harjaka, S.P., M.P., akademisi Faperta UGM mengatakan, dengan adanya persaingan penggunaan lahan, maka metode pengoptimalan produksi kedelai yang mesti dilakukan tidak lagi berbasis perluasan lahan, tapi mengoptimalkan lahan yang ada dan tingkatkan produktivitasnya.

Tantangan OPT

Namun tantangan yang dihadapi yaitu OPT (organisme pengganggu tumbuhan) yang menyerang kedelai. Masalahnya, sejak tanam sudah ada lalat bibit, umur 3 minggu ada lalat penggerek, umur 4 minggu ada ulat penggulung dan ulat grayak dan seterusnya hingga panen.

Sasaran utama hama kedelai menurut Tri Harjaka adalah polong. Seringnya pestisida yang digunakan

tidak mampu menembus sasaran. Ditambah lagi fase kritis kedelai yaitu pada masa pembentukan polong. "Biasanya petani tidak tahu jika hama tersebut sudah ada dalam polong, sehingga terlambat dalam pengendaliannya," katanya.

Menyikapi hal tersebut, penerapan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) merupakan langkah yang tepat. Misalnya, melalui budidaya tanaman sehat yaitu dengan mengoptimalkan daya tumbuh, sehingga tanaman memiliki ketahanan terhadap serangan OPT.

Tri Harjaka mengatakan, setidaknya ada delapan strategi dalam penanganan OPT kedelai. Strategi tersebut antara lain, perencanaan tanam sejak awal, pengolahan lahan pada kedelai yang butuh olah tanah, penggunaan benih disesuaikan dengan lokasi.

Selain itu ungkapannya dengan teknik penanaman yang tepat, penyediaan pupuk dan pemupukan berimbang, sistem pengelolaan air untuk pertumbuhan tanaman, perlindungan tanaman, serta panen dan pengelolaan pasca panen.

Diharapkan melalui penerapan strategi tersebut, dapat meningkatkan produktivitas kedelai dari rata-rata nasional 1,4 ton/ha menjadi 2-3 ton/ha. "Dengan demikian peningkatan produksi kedelai yang selama ini cenderung berorientasi terhadap perluasan lahan dapat diubah menjadi pengoptimalan lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas," katanya.

Sementara itu, Subejo, SP., M.Sc., Ph.D, Dosen Fakultas Pertanian UGM mengatakan, diperlukan

terobosan untuk menekan impor kedelai secara signifikan dan menjaga stabilitas harga. Untuk itu harus ada program strategis melalui penguatan inovasi produksi.

"Inovasi pemuliaan benih kedelai yang produktif, adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki cita rasa baik," katanya. Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh UGM dan perlu dikembangkan adalah benih kedelai hitam Mallika.

Bisa juga melalui inovasi lain terkait dengan peningkatan produktivitas kedelai yaitu mikoriza. Melalui mikoriza dapat meningkatkan eksplorasi perakaran sampai ratusan kali volumenya, sehingga penyerapan air dan nutrisi menjadi lebih baik yang membuat tanaman kedelai menjadi lebih subur.

Selama ini diakui, harga kedelai lokal kurang atraktif bagi petani sehingga budidaya kedelai tidak menjadi prioritas. Apalagi tingginya kompetisi dengan komoditas pertanian yang lebih menguntungkan. "Alternatifnya lakukan budidaya kedelai dengan memanfaatkan lahan perhutanan sosial serta pengembangan komoditas substitusi kedelai," ujarnya

Potensinya Besar

Untuk mendapatkan produktivitas yang baik menurut Tri Harjaka diperlukan kedisiplinan. Jika melihat potensi lahan penanaman kedelai, Tri melihat cukup luas, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, benih kedelai unggul juga ada. Bahkan pemerintah memberikan subsidi pupuk.

"Pada prinsipnya kedelai itu butuh air, kemudian perlindungan tanaman. Kita punya peluang yang cukup besar," tambahnya. Sebagai gambaran di Indonesia kedelai bisa ditanam di lahan sawah maupun tadah hujan, bahkan lahan perkebunan dan hortikultura

Dengan kebutuhan kedelai hampir 3 juta ton dan saat ini sebagian kebutuhan masih impor, Tri Harjaka melihat, peluang

kedelai dalam negeri mengisi kebutuhan sangat besar. "Secara logika, pasarnya terjamin karena negara kita adalah negara yang membutuhkan kedelai," katanya.

Sementara itu, Peneliti BPTP Jambi, Hery Nugroho mengatakan, Jambi menjadi salah satu sentra kedelai nasional. Di Jambi ada satu kabupaten yang bisa tanam kedelai tiga kali setahun. Karena itu, perlu didukung penyediaan benih kedelai secara insitu, terutama di wilayah sentra produksi.

"Saat ini kami membudidayakan kedelai di lahan replanting sawit dengan sistem tumpang sari dengan jagung atau kedelai. Ini kita lakukan supaya petani sawit tidak merugi selama 3 tahun menunggu tanaman berproduksi," ujarnya.

Kabupaten Tebo menjadi salah satu sentra kedelai di Jambi yang memiliki kearifan lokal. Bahkan satu-satunya daerah yang menanam kedelai sebanyak tiga kali dalam setahun. Dari 3.200 ha program reguler dan 1.000 ha program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo dan Tanjungjabung Timur hampir seluruh kebutuhan benih dipenuhi dari Tebo.

Dari data tersebut menurut Hery, menunjukkan bahwa produktivitas dan produksi kedelai di tingkat petani masih dapat ditingkatkan. Misalnya melalui penerapan inovasi teknologi kedelai, memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi biososial lahan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Hery yakin Jambi dapat menjadi daerah sentra produksi kedelai yang dapat memasok kebutuhan wilayah Sumatera. Apalagi Kabupaten Tebo yang memiliki potensi produktivitas kedelai mencapai 2 ton/ha. "Kegiatan perbanyak benih sumber merupakan salah satu upaya untuk terus menjaga ketersediaan benih sumber kedelai," katanya.

Echa/Yul/Ditjen PSP



Dampak Ganda Penggunaan Pupuk Organik



Senyum petani di Palangka Raya yang menggunakan pupuk organik

Pupuk organik kini menjadi salah satu pilihan petani saat ketersediaan pupuk subsidi terbatas. Namun di sisi lain penggunaan pupuk juga ramah lingkungan, bahkan dapat membantu memperbaiki tanah pertanian yang kini tengah sakit.

Dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah, volume pupuk subsidi yang pemerintah berikan sangat kurang dibandingkan kebutuhan petani. Data Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk petani totalnya mencapai 23-26 juta ton. Sementara alokasi anggaran yang pemerintah sediakan hanya mampu memberikan subsidi untuk 9 juta ton. Artinya ada gap hampir 14-17 juta ton.

Karena itulah kerap terdengar kabar petani mengeluh langkanya pupuk subsidi. Jika melihat data alokasi pupuk subsidi, maka sebenarnya bukan langka, tapi memang jumlah pupuk subsidi sangat terbatas. Untuk itulah, pemerintah pun mendorong petani menggunakan pupuk organik.

Peneliti Ahli Utama Balai Penelitian Tanah, Badan Litbang Pertanian, Antonius Kasno mengakui, pupuk merupakan sarana produksi yang penting bagi usaha tani. Namun demikian, penggunaan pupuk anorganik yang selama ini dipakai petani bukan salah satunya untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

"Pemupukan itu harus tepat dosis, selain tepat waktu, cara dan jenisnya," katanya. Selama ini lanjut Kasno, rekomendasi pemupukan di tingkat petani belum berdasarkan status hara tanah. Padahal Badan Litbang Pertanian sudah mengeluarkan alat Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) untuk mengukur unsur hara tanah.

Menurutnya, semakin besar dosis

pupuk anorganik tidak menjamin produktivitas makin tinggi. Ada saatnya memang pemupukan anorganik bisa meningkatkan hasil, tapi ada saatnya penambahan dosis pupuk anorganik justru membuat produksinya menurun.

"Pemupukan berimbang menjadi kunci meningkatkan hasil dan mencegah pencemaran lingkungan. Jadi sebaiknya pemupukan berdasarkan hasil dari pengujian dengan PUTS," tuturnya.

Perbaiki Tanah yang Sakit

Ke depan Kasno melihat, penggunaan bahan organik dan pupuk hayati menjadi salah satu yang harus petani berikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. "Yang utama sekarang adalah perbaikan tanah melalui penggunaan pupuk organik," ujarnya.

Menurutnya, penambahan bahan organik akan memperbaiki proses biokimia dalam tanah. Pasalnya, tanaman padi tidak bisa menyerap bahan organik secara mentah, tapi harus dibuat menjadi anion dan kation agar mudah diserap tanaman. "Jika tanah unsur haranya makin baik, maka penggunaan pupuk anorganik akan makin berkurang," tegasnya.

Sementara itu Peneliti BPTP Jawa Barat, Nana Sutrisna mengatakan, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan membuat tanah menjadi sakit. Hasil kajian BPTP di sentra produksi pangan di Jawa Barat, kandungan C-organik tanah kurang dari 2 persen.

"Di beberapa wilayah, untuk meningkatkan produktivitas, petani menggunakan pupuk organik

sampai 300 kg dan NPK sampai 400 kg, namun hasilnya tidak signifikan. Justru tanah menjadi jenuh," katanya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, hama padi, terutama wereng makin meningkat. Ini terjadi karena penggunaan pestisida yang tidak selektif. Bahkan menyebabkan musuh alami dari wereng menghilang dan terjadi pencemaran lingkungan.

Dengan kondisi tanah yang makin jenuh, menurut Nana perlu adanya penambahan bahan organik. "Salah satu yang bisa petani memanfaatkan pupuk organik insitu seperti jerami. Jerami adalah aset besar untuk memperbaiki kesuburan tanah. Lahan sawah akan baik, jika fisik tanah juga diperbaiki," katanya.

Menurut Nana, penggunaan NPK yang berlebih oleh petani menyebabkan unsur P dalam tanah meningkat. Karena itu, perlu ada upaya memanfaatkan P yang tersedia di tanah dengan mengurai menggunakan pupuk hayati.

Khusus penggunaan pupuk hayati, Nana mengatakan, saat ini sudah banyak produk yang dihasilkan, termasuk dari Badan Litbang Pertanian. Beberapa manfaat pupuk hayati diantaranya, mengandung zat pemacu pertumbuhan akar, daun, pembungaan dan pemasakan biji.

Pupuk hayati juga berguna untuk penambat nitrogen dari udara, pelarut fosfat, serta pengambilan hama makro dan mikro tanah. Pupuk hayati juga berfungsi mengembalikan kesuburan dan kesehatan tanah, menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah, serta mengurangi kerusakan tanah.

Petani Beralih ke Pupuk Organik

Sementara itu sejumlah petani padi di Kota Palangka Raya kini beralih menggunakan pupuk

organik Eco Farming. Pergantian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan produktivitas yang tinggi.

Siswanto, Ketua Kelompok Tani Swasembada menyebutkan, dirinya mencoba mengetahui perbedaan penggunaan pupuk organik dan anorganik saat menanam padi di lahannya yang luasnya 1 ha. Dilahannya seluas 0,5 ha menggunakan pupuk organik dan lahan lainnya 0,5 ha menggunakan pupuk kimia. Sedangkan varietas yang digunakan adalah varietas Thailand.

Pemberian pupuk eco farming dilakukan dua kali yakni saat padi berumur 15 hari dan umur 28 hari. Pada pemberian pupuk yang pertama, hama wereng yang menyerang sudah dapat teratasi. Sedangkan pada lahan yang tidak menggunakan pupuk eco farming, hama tetap menyerang. "Ternyata penggunaan pupuk organik eco farming lebih menguntungkan karena hama wereng yang menyerang dapat teratasi," ujarnya.

Keunggulan lain pupuk eco farming sebut Siswanto terletak pada usia tanam yang pendek yakni panen hanya 82 hari dari 95 hari umur normal panen padi. Selain itu dapat meningkatkan produktivitas padi yakni jumlah anakan bertambah dari 15-17 anakan menjadi 25 anakan.

"Dengan menggunakan pupuk eco farming ini sangat membantu petani, karena harga pupuk lebih murah, sehingga biaya produksi jauh lebih murah. Cara aplikasinya juga lebih mudah, tidak ribet," kata Siswanto.

Sementara itu petani lainnya, Irwanto yang juga menggunakan pupuk eco farming mengakui, ada keunggulan yang sangat menarik yakni dapat meningkatkan unsur tanah, meningkatkan hasil produksi, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, mempercepat waktu panen dan meringankan biaya produksi.

"Penggunaan eco farming ini merupakan solusi petani. Ini lebih modern lagi karena kita sudah beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik," kata Irwanto.

Budidaya padi menggunakan pupuk Eco Farming merupakan kerjasama dengan PT. Best Eco Farming yang merupakan bagian dari program Anak Bangsa. "Untuk petani Indonesia, mari kita galakkan pembangunan pertanian kita karena dengan menggunakan pupuk organik, kita dapat sehat, kuat dan rakyat bisa makmur," kata Siswanto.

Dewi Ratnasari/Yul/Ditjen PSP

Pakar Menjawab

Sampaikan pertanyaan tentang pertanian melalui WA ke: 087881605773 atau ke: sintani@cbn.net.id sertakan nama dan alamat anda

Jangan Gunakan Kecambah Sawit Sembarangan

Bibit sawit memang seharusnya menggunakan bibit unggul untuk menghasilkan produktivitas sawit yang tinggi. Tapi di wilayah kami beberapa petani beranggapan bahwa bibit yang dicabut asalan dibawah pohon sawit yang memiliki kualitas baik, juga baik untuk dijadikan bibit untuk tanam baru. Apakah hal itu hal tersebut dapat dilakukan oleh petani?

Idawati -- BPP Tommo

Peredaran benih kelapa sawit ilegal di masyarakat cukup banyak diperdagangkan bebas, yakni benih kelapa sawit yang tidak memenuhi aspek legalitas, karena selain diproduksi oleh lembaga/ perorangan yang tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memenuhi syarat-syarat serta tatacara pelepasan varietas, juga tidak melalui proses sertifikasi.

Ada pekebun yang sengaja menggunakan benih atau kecambah yang berasal dari buah atau kecambah yang dikumpulkan di bawah pohon-pohon kelapa sawit yang terdapat di kebun produksi Tenera (T) atau pohon Dura (D) yang disilangkan.



Cara ini tergolong ilegal karena akan menghasilkan kontaminasi dura sehingga akan mengurangi produksi TBS dan CPO. Produktivitas rendah, tingkat produksi TBS hanya 50% rendemen CPO maksimal 18%.

Pengguna benih ilegal akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan biaya yang dikeluarkan sia-sia. Para pekebun akan sulit untuk mengembalikan pinjaman kredit karena produksi yang dihasilkan rendah.

Lantas bagaimana caranya

memperoleh benih/ kecambah sawit yang legal? Kecambah kelapa sawit dapat dipesan ke sumber benih resmi (ditetapkan oleh pemerintah) dengan membawa Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan/ Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Benih dalam polybag dapat dibeli dari penangkar benih resmi (memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan/TRUP) dan disertifikasi oleh UPTD Perbenihan Tanaman

Perkebunan setempat.

Saat ini sejak 2019 terdapat 19 produsen benih kelapa sawit dengan 58 varietas DxP di Indonesia. Pastikan selalu gunakan benih unggul yang asli untuk hasil produksi yang terbaik.

Untuk mempermudah distribusi dan pembelian benih (kecambah) asli dan bersertifikat asli, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah mengeluarkan platform MySawit yang bisa diakses melalui website maupun smartphone. Dengan aplikasi, layanan pembelian tetap dapat berjalan. Tanpa petani datang ke kantor PPKS di Medan, Sumatera Utara.



Oleh : Peneliti PPKS, Ratnawati Nurkhoiry M.Si



Selama bertahun-tahun bekerja sebagai peneliti, penulis merekam banyak data dan berbagai kejadian yang dilihat dan dirasakan di sekitar pedesaan dan pertanian. Catatan itu memberikan gagasan kepada penulis untuk menggambarkan kembali dalam bentuk tulisan Novel yang bisa dibaca juga oleh selain peneliti.

Paimin Pulang Kampung

"Tapi Paimin. Dengar, nih," Samad meneruskan bicaranya.

"Baru saja aku punya pikiran lain. Cara berpikir kalian itu salah. Ini serius. Jangan bangga karena petani kita tidak banyak menuntut, atau karena bisa tetap bertahan dalam kemiskinan. Atau karena

petani Amerika itu takut kita mengirim hasil pertanian kita ke sana. Kamu seharusnya malu karena petani kita terus menerus miskin. Dahulu nenek moyangnya miskin, sekarang orang tuanya miskin, besok lusa anak-cucunya juga miskin. Malu, gak? Kalau aku

jadi kamu, aku malu sekali. Sekarang bagaimana caranya supaya mereka bisa kaya seperti petani di Amerika yang kamu bilang itu," kata Samad berapi-api.

"Petani sejak jaman leluhur sampai seluruh keturunannya miskin. Padahal jasanya besar. Itu yang harus kamu pikirkan."

Samad sudah menggelegak. Mendidih. Suaranya serak dan matanya memerah. Paimin dan yang lainnya masih diam. Tak ada yang berani menatap mata Samad.

"Aku pikir kalian malu-malu mengatakannya. Kalau bicara tentang orang miskin, kalian harus ngomong lugas. Tegas. Terus terang. Supaya kita semua bisa mengerti," katanya lagi.

"Kang Samad selalu jadi bintang dalam pertemuan. Betul, ya, bapak ibu?" kata kuwu.

"Betul, setuju..."

Kaum laki-laki gemuruh di ruang tamu, perempuan duduk emok di atas tikar di ruang tengah. Juwita duduk bersebelahan dengan bu Kuwu. Mereka tak peduli dengan obrolan para lelaki. Mereka sibuk dengan urusan dan obrolannya sendiri.

Semalaman Paimin merenung

dan berpikir. Masalah pertanian banyak tidak dimengerti oleh orang yang dipercaya untuk mengurusnya. Seperti dia, misalnya. Kebijakan apa yang paling jitu supaya bisa menembak permasalahan sehingga pembangunan pertanian itu bisa bergulir? Ada batu besar yang mengganjal sehingga pertanian dan petaninya tidak cepat berubah. Tidak kurang dari 50 persen tenaga kerja di sektor pertanian adalah jumlah yang besar. Mereka menghadapi permasalahan besar. Tapi senjata untuk menembaknya terlalu kecil.

"Mungkin meriam yang akan menembaknya sedang diangkat oleh banyak orang, dan masing-masing ingin berjalan ke arah yang berbeda-beda. Ke rumahnya masing-masing. Ha ha"

Meriamnya tidak pernah mengarah pada sasaran, dan walaupun sudah benar arahnya, pelurunya tidak tersedia.

"Kalau pelurunya sudah ada?"

"Tidak juga segera menembak, karena rebutan siapa yang akan duluan menembaknya, ha ha"

"Karena yang menembak itulah yang dianggap berjasa." (46)

Bersambung



AgroGain®
**BERLIMPAH
KEBAIKAN**

FMC

**MENINGKATKAN
IMUNITAS**

**OPTIMALKAN BUNGA
DAN BUAH**

**PANEN
BERKUALITAS**

**AKTIVASI
HORMON**

**BENIH
PERTIWI®**

**SEMANGKA PILIHAN
PETANI INDONESIA**

GAMA

MARINA

PLATINI

WINDA

PASSPORT

BIANCA

BENIH PERTIWI® ... Mendukung Petani Indonesia

Bambang Ajak Petani Sawit Terapkan GAP



Semangat dan tangguh dalam membela petani harus ada dalam tindakan seorang penyuluh. Inilah yang dilakukan penyuluh pertanian yang bertugas di Aceh bernama Bambang Sri Sugiantoro.



Bambang Sri Sugiantoro

Kehadiran penyuluh di lapangan sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada petani binaan. Salah satu tujuan penyuluhan agar bisa mengubah sikap dan perilaku petani dalam meningkatkan pengetahuan.

"Penyuluh dimana pun tetap menyuluh jangan sia-sia kesempatan kita, karena tidak semua orang bisa menyuluh. Harus selalu bersemangat dan tangguh untuk membela petani," ungkap anak bungsu dari 6 bersaudara kelahiran Medan, 14 September 1973 dari pasangan alm Sugimin (alm) dan Rubiah (alm).

Dengan persetujuan Dinas

Pertanian dan Perkebunan Aceh, Bambang sejak tahun lalu mendapat tugas tambahan dalam kegiatan NGO Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) yang didanai Bank Dunia. Ia bersama 8 temannya mengajak petani menerapkan budidaya sawit secara Good Agriculture Practices (GAP).

Kegiatannya memberikan pelatihan dan penyuluhan, terutama sertifikasi tingkat nasional dan dunia. Harapannya agar harga tandan buah sawit (TBS) petani bisa lebih tinggi. "Tugas kami setiap bulan memberikan materi penyuluhan 5-6 kali," ujarnya.

Menurutnya sebelum ada penyuluhan, petani biasanya menanam

bibit sawit sembarangan (afkir), sehingga hasilnya sedikit 1,2-1,5 ton/ha/bulan. Namun dengan menggunakan bibit unggul bersertifikat dan pemupukan berimbang dapat meningkatkan produksi hingga 1,8-2 ton/ha/bulan. "Ini karena bibit yang digunakan petani sudah terbukti keunggulannya," tambah Bambang.

Sebagai tanaman tahunan, menurutnya, untuk menghasilkan buah sawit perlu pemupukan sesuai aplikasi dan umur tanaman. Umur sawit di atas 10 tahun biasanya menggunakan pemupukan Urea 4,5-5 kg, NPK dan TSP 4-6 kg/tanaman per tahun yang diberikan

2-3 kali aplikasi.

Di lokasi binaannya Bambang kerap kali menganjurkan penggunaan pupuk organik. Pasalnya, hampir semua petani memiliki ternak, sehingga jika ada kekurangan pupuk kimia, maka petani bisa menambah pupuk organik sebanyak 6-12 kg.

Bahkan karena dekat dengan pabrik pengolahan sawit, Bambang mengajak petani memanfaatkan jangkos sawit. "Kita juga perlu melakukan koordinasi waktu dengan petani, jika perlu pertemuan dilakukan pada malam hari," ungkap Bambang yang kini telah dikaruniai tiga anak.

Karena merasa bermanfaat, banyak petani merasakan peran penyuluhan. Bahkan kini petani binaan Bambang sering meminta diikutsertakan dalam berbagai acara pelatihan dan demplot untuk percontohan.

Identifikasi Masalah

Saat pertama kali melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh, langkah pertama yang dilakukan Bambang adalah mengidentifikasi lokasi dan menggali permasalahan serta potensi wilayah binaan. Kemudian disusun dalam program penyuluhan pertanian untuk rencana tindak lanjut dalam memberikan solusi.

"Jika tidak ada pertemuan bulanan saya melakukan anjangan ke kelompok tani," kata alumni Fakultas Pertanian jurusan Agronomi, Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh tahun 2000.

Mendapat amanah memegang dua WKPP yakni Desa Bandung Jaya (komoditi perkebunan seluas 80-100 ha) dan Desa Krueng Sikajang (tanaman pangan) tak membuat Bambang lalai dalam tugasnya. Ia mencoba mengatur waktu agar tetap bisa mengunjungi petani.

Untuk mempercepat transfer teknologi di tingkat petani, selain demplot dan sekolah lapang dirinya mengajak petani menonton film penyuluhan. "Umumnya petani akan mengikuti arahan penyuluh sesuai hasil demplot yang dilakukan dan telah terbukti bukan hanya teori saja," ujarnya.

Sebagai anak TNI, Bambang selalu disiplin dalam segala hal. Atas dasar itulah kini Bambang sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun tahun 2013 bersama isterinya. Bambang juga sering menyampaikan untuk tidak malu memiliki ayah seorang petani.

"Karena dari hasil usaha tani kita bisa sekolah dan tersedia pangan bagi masyarakat," katanya. Terakhir pesannya agar penyuluh tetap semangat dan jangan mudah menyerah karena tidak semua orang bisa seperti kita. Semoga. **Abda/Yul**

Keluar dari Perusahaan Perkebunan, Pilih Jadi Penyuluh

Perjalanan Bambang Sri Sugiantoro menjadi seorang penyuluh menjadi kisah tersendiri bagi anak dan cucunya kelak. Setelah menjadi lulus kuliah, tahun 2001 Bambang justru tak langsung menjadi seorang penyuluh.

Dirinya bekerja di salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kota Pinang, Labuhan Batu Sumatera Utara. Bahkan cukup lama yakni 6 tahun. Meski gaji di perusahaan lebih tinggi, tapi tidak menyurutkan semangatnya memajukan petani yang harus keliling desa dan menyuluh pada 16 kelompok tani.

Ketika Kementerian Pertanian

membuka rekrutmen THLTBPP tahun 2009, Bambang mencoba mendaftar, meski hanya menerima honor Rp 1,4 juta. "Setiap hari saya mendampingi 2 kelompok tani. Penyuluh sebagai pelayan yang harus mendengarkan apa permasalahan dan keluhan petani," tuturnya.

Bambang mengakui banyak suka duka dalam mendampingi petani. Walaupun ada berbagai permasalahan di lapangan, namun ia mengingatkan penyuluh lainnya harus dihadapi dengan kepala dingin dan tidak mudah terprovokasi. "Karena pertimbangan tingkat pendidikan yang berbeda, kita harus bisa maklum serta menyesuaikan dengan keadaan," katanya.

Bambang mengaku tahun 2009 pernah mengikuti berbagai pelatihan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan ke Medan Sumatera Utara. Buah manis yang dilakukan Bambang, setelah diangkat menjadi PPPK pada Maret 2021 akhirnya dipercayakan sebagai Koordinator BPP di Kecamatan Seruway Februari 2022.

"Tahun 2012 saya pernah terpilih sebagai Penyuluh Teladan se Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Bambang bangga. Pada bulan Februari 2022 lalu Bambang mendapat promosi pindah tugas ke tempat lain. Semoga dengan amanah baru bisa terus memajukan petani. **Abda/Yul**

Joko Iriantono dan Wahyu Darsono Nahkodai GAPENSISKA



Integrasi Sapi Sawit tentunya membutuhkan partisipasi dari berbagai stakeholder. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), petani kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit hingga peternak.

Guna menjembatani seluruh pelaku usaha kini hadir organisasi Gabungan Penyelenggara dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA).

Multi stakeholder Sistem integrasi sapi-sawit (SISKA) yang terdiri dari pemerintah, akademisi, hingga asosiasi pelaku usaha ternak dan asosiasi pelaku utama sawit berkumpul bersama di Bogor selama 3 hari (9 Maret-11 Maret 2022), dalam Kongres I pembentukan GAPENSISKA.

Dalam Kongres I, organisasi memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk menjalankan roda GAPENSISKA dan mendorong implementasi integrasi sapi sawit untuk semua stakeholder peternakan dan perkebunan secara luas.

Nama Joko Iriantono kemudian disepakati anggota Kongres I GAPENSISKA menjadi Ketua Umum dan Wahyu Darsono menjadi Sekjen GAPENSISKA periode 2022-2026. Saat ini Joko Irianto adalah Direktur Utama PT. Andini Agro Loka, dan Wahyu Darsono adalah Ranch Manager PT Buana Karya Bhakti (BKB).

Percepat Integrasi

Terpilih menjadi Ketua Umum GAPENSISKA, Joko Iriantono mengungkapkan, untuk pengembangan sapi potong di Tanah Air, harapan yang realistis adalah dengan implementasi pengembangan SISKA di lahan sawit.

Dengan latar belakang pelaku usaha feedlotter (penggemukan sapi), Joko sering melihat padang penggembalaan sapi-sapi di Australia. "Dengan alam yang luar biasa di Indonesia kenapa tidak bisa dikembangkan di Indonesia," ujarnya.

Pendapat hampir serupa diungkapkan Sekjen GAPENSISKA, Wahyu Darsono. Dirinya yang

telah menjadi praktisi SISKA Ranch ini mengungkapkan dari pendapat pakar yang berada dalam GAPENSISKA, integrasi sapi sawit ini memberikan manfaat dan simbiosis mutualisme antara ternak dan lahan sawit.

Wahyu mengungkapkan, adanya GAPENSISKA ini bisa menjadi langkah awal untuk akselerasi, memperluas adopsi, ekspansi integrasi sapi-sawit di Tanah Air. "Kita fokusnya pada konteks integrasi sapi sawit yang melibatkan masyarakat dengan pola-pola kemitraan," katanya.

GAPENSISKA diakui Wahyu sangat terbuka jika ada Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang ingin mengembangkan SISKA secara mandiri di lahan sawit mereka. "Kita dorong agar perusahaan bisa menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar kebun sawit dan bisa memelihara sapi di sekitar lahan kebun secara terkontrol. Sehingga konsepnya adalah pemberian ekonomi masyarakat sekitar kebun sawit," jelasnya.

Mengenai langkah pertama GAPENSISKA pasca Kongres, Wahyu mengungkapkan GAPENSISKA telah didukung Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership. Dengan demikian program kolaborasi terkait percepatan dan implementasi integrasi sapi sawit.

Menurutnya, GAPENSISKA menjadi helpdesk bagi siapa saja, terutama pelaku usaha, pelaku utama dan pemerintah daerah, yang ingin implementasikan integrasi sapi sawit. Baik yang sudah eksisting, baru mau mulai dan lainnya.

Dukungan Indonesia Australia Red Meat and Cattle Partnership sendiri berupa SISKA Supporting Program. Diantaranya, promosi dan sosialisasi terhadap berbagai stakeholder, pengembangan SDM Peternakan dan Perkebunan dan

"Untuk peningkatan SDM, kita

ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kolaborasi dengan YESS Program Kementan, Professional Training untuk level Manager dan lainnya. Ini semua untuk akselerasi integrasi sapi sawit," katanya.

Lokasi Percontohan

Meskipun baru terbentuk asosiasi stakeholder, diakui Wahyu percontohan Sapi-Sawit dalam bentuk SISKA Supporting Program sudah melahirkan bentuk contoh kemitraan dengan nama Sistem Integrasi Sapi Sawit Kemitraan Inti Plasma (SISKAKu Intip) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wahyu menambahkan, Model SISKAKu Intip ini di Kalsel sudah ada di 7 lokasi dan harapannya bisa di diseminasikan ke lokasi lainnya di Tanah Air. "Jadi masyarakat sekitar berkelompok dan ngangon di sekitar areal perusahaan. Inisiatifnya dari CSR Perusahaan dan Pemda memfasilitasi pada aset-aset yang lain," katanya.

Untuk diketahui, Sistem integrasi sapi-sawit (SISKA) memadukan usaha budidaya ternak sapi dalam usaha Perkebunan kelapa sawit

tanpa mengurangi aktifitas dan produktivitas tanaman. Steering Committee (SC) Kongres Pertama Gapensiska, Prof Muladno, program integrasi sapi – kelapa sawit adalah salah satu kegiatan berpotensi memberikan keuntungan bagi para pelaku perkebunan kelapa sawit.

"Saat ini Pemerintah pusat maupun daerah bisa mengkampanyekan program integrasi sapi-kelapa sawit (SISKA) untuk memberikan alokasi sumberdaya peternakan ke perkebunan," katanya.

Dari hasil sidang Kongres, organisasi ini akan berfungsi sebagai wadah kegiatan dan aktivitas dalam pengerahan SDM dan pemikiran dalam pengembangan usaha Integrasi Sapi-Kelapa Sawit secara maksimal, melalui efisiensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan, biomasa, produk hasil ikutan pabrik minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Upaya ini juga mendukung program nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah dari sumberdaya ternak sapi untuk memenuhi pasokan bagi kebutuhan konsumsi daging sapi nasional. **Gsh/Yul**

Wapres Tengok Fasilitas Pengelolaan Beras Bulog



Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi kompleks pergudangan modern Perum BULOG di kawasan Kepala Gading, Jakarta, Jumat (11/3) untuk melihat fasilitas teknologi pangan yang dimiliki lembaga pengelola pangan tersebut.

"Dengan dilengkapinya gudang-gudang pangan Perum BULOG

dengan mesin RTR atau rice to rice ini, kemampuan pengelolaan kualitas pangan pemerintah juga semakin baik dan upaya menjamin ketersediaan pangan dalam jangka waktu yang panjang juga sudah bisa kita penuhi," kata Ma'ruf Amin usai melihat fasilitas dan teknologi RTR.

Wapres yang berkunjung secara mendadak itu mendapat

penjelasan langsung dari Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso. Mantan Kepala BNN itu memberikan keterangan secara detail manfaat dan keunggulan mesin-mesin RTR yang tersebar di daerah sentra produksi beras. Diantaranya, di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan.

Wakil Presiden mengapresiasi upaya perum BULOG mendatangkan teknologi mesin RTR, sehingga memastikan tidak saja ketersediaan, kualitas berasnya juga menjadi semakin baik. Disamping itu juga Wapres memastikan kecukupan stok daging menjelang Puasa dan Idul Fitri betul-betul terjamin.

"Kalau ketersediaan beras dan daging aman, maka masyarakat tidak perlu khawatir," katanya. "Kita sudah lihat sendiri saat ini bagaimana Perum BULOG mampu menyediakan kebutuhan pokok khususnya beras dan daging yang ditugaskan Pemerintah dalam jumlah yang cukup atau aman. Stok

pangan ini juga tersedia merata di semua unit Gudang BULOG di seluruh Indonesia," tutur Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Dirut Perum BULOG Budi Waseso mengatakan, modernisasi Gudang BULOG dilakukan mulai tahun 2020 yang ditempatkan di daerah yang menjadi sentra produksi beras. Dengan demikian, kualitas beras yang diproduksi BULOG sudah dapat dijamin.

Selain itu juga penyalurannya pada situasi darurat atau untuk mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan beras dan pangan lainnya bisa terlaksana dengan cepat. "Kami sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin positioning Perum BULOG dari beberapa tahun sebelumnya sehingga saat ini BULOG sudah sangat siap menjalankan tugasnya sebagai Operator Utama guna menjalankan penugasan dari Badan Pangan Nasional," kata Budi Waseso. **Yul**

Rumah Zakat Berikan Kementan Happiness Awards 2022



Rumah Zakat memberikan penghargaan "Happiness Awards 2022" kepada Kementerian Pertanian. Penghargaan tersebut diserahkan CEO Rumah Zakat, Nur Efendi dan diterima langsung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Bogor, Kamis (10/3).

Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana sosial lainnya melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Salah satu program yang ditawarkan Rumah Zakat adalah Desa Berdaya yang menurut Nur Efendi adalah program pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal dengan sistem integrasi, sehingga mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzaki.

"Di Desa Berdaya itu ada petani berdaya, petani milenial. Kemudian ada pendampingan kelompok, pembiayaan sarana prasarana termasuk kemudian pendampingan

akses pasar," kata Nur Efendi.

Menurut Nur Efendi, Rumah Zakat dan Kementan selama ini telah bekerja sama dalam bidang pertanian di beberapa wilayah, baik yang sifatnya pendampingan maupun program bersama. "Terakhir ini, di Subang, kita melakukan panen cabai bersama Kementan yang waktu itu diwakili Direktur Pembiayaan," ungkapnya.

Penghargaan yang diberikan tersebut menurutnya sebagai bentuk apresiasi Rumah Zakat atas keberpihakan Kementan selama ini kepada petani. "Petani adalah masa depan bagi bangsa Indonesia. Kita akan terus mendukung dan berkolaborasi," katanya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai hal ini merupakan kolaborasi yang bagus. Rumah Zakat dan Kementan memiliki tujuan yang sama dan tentunya mulia. Yaitu bagaimana agar kehidupan petani terus mengalami perbaikan dan kebutuhan makan penduduk Indonesia tercukupi dan harus dipastikan aman. **Yul**

Kementan Jaring Milenial jadi Young Ambassador

Setelah hadirnya Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan (DPA), Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali menjadi role model petani milenial melalui Young Ambassador. Tertarik ikut?

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Idha Widi Arsanti saat Press Conference "Hibah Kompetitif Yess Program dan Young Ambassador 2022", Sabtu (5/3) mengatakan, melalui Young Ambassador, program YESS mengajak kaum muda yang telah sukses di sektor pertanian untuk berperan secara aktif mempromosikan potensi sektor pertanian kepada kaum muda sebagai sektor yang modern.

Bukan hanya itu, mempromosikan bahwa pertanian juga bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi dan memberikan dampak sosial terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, Young Ambassador akan terlibat secara aktif dalam kegiatan talkshow, roadshow dan publikasi lainnya yang disponsori Program YESS.

"Young Ambassador akan mempromosikan bahwa pertanian itu seksi dan modern serta

memberikan jaminan pendapatan dan masa depan luar biasa," tuturnya.

Untuk tahun 2022 ini, Santi menuturkan Young Ambassador ini menjadi pilot project. Karena itu, pendaftaran dan seleksi bakal calon peserta Young Ambassador Tahun 2022 dilakukan melalui undangan terhadap wirausaha muda pertanian di seluruh Indonesia.

Undangan berdasarkan rekomendasi dari UPT Pendidikan BPPSDMP Kementerian Pertanian, seperti Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Engineering Pertanian Indonesia (PEPI). Selain itu, rekomendasi dari BPH Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan (DPM/DPA) juga diterima untuk calon peserta Young Ambassador.

"Sedangkan untuk tahun 2023, pendaftaran bakal calon Young Ambassador tahun 2023 akan dilakukan secara terbuka via platform online Program YESS dan akan dimulai pada Bulan Oktober tahun 2022," tambahnya.

Pendaftaran Young Ambassador tahun 2022 akan dibuka 14-20 Maret 2022 dan diseleksi hingga menghasilkan 50 besar mengikuti pembekalan (bootcamp) 24-29 Maret 2022. Sesi penjurian akan berlangsung 1-30 Mei 2022 dengan memberikan pemaparan materi hasil pembekalan. **Gsh/Yul**

Aneka Garam dari Ni Made Toya



Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber mineral alami, salah satunya garam. Meski demikian, Indonesia masih mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian.

Melihat potensi yang ada, Ni Made Toya pun terpikir untuk membuat produk garam yang mengambil bahan dari dalam negeri. Kemudian diolah secara tradisional untuk memberdayakan petani garam lokal.

Dengan brand Toya Salt, Ni Made Toya membangun usahanya di Bali. Toya Salt menyediakan berbagai varian garam, mulai untuk memenuhi kebutuhan memasak, hingga untuk relaksasi (Spa). Garam masak yang ditawarkan Toya Salt memiliki beberapa varian.

Ada garam dengan berbagai rasa, garam asap atau smoked salt, dan black garlic salt. Setiap garam yang diproduksi diambil dari sumber daya lokal yang berasal dari 12 provinsi di Indonesia.

Bahkan semua rasa rempah dari produk Toya Salt yang ada juga diambil dari berbagai daerah Indonesia. Misalnya lada panjang yang diambil dari Bali, atau pala yang berasal dari Aceh. Rupanya, produk garam dengan rasa ini memang cukup digemari konsumen baik di dalam maupun luar negeri.

"Kami mengambil seluruh bahannya secara lokal, karena kami menyadari petani garam di Indonesia masih belum mendapatkan upah yang cukup," kata Ni Made Toya yang memang berniat untuk menyejahterakan dan mengangkat derajat kehidupan petani garam di Indonesia.

Ni Made Toya sendiri sudah mengenal garam sejak usianya 8 tahun hingga kini usianya 52 tahun. "Kita harus bantu petani garam. Kasian mereka kalau tidak dibantu," katanya saat dihubungi SinarTani melalui sambungan Telephone.

Keluarga Garam

Ni Made Toya mengakui, dirinya memang aslinya adalah dari keluarga garam. Karena itu dirinya mengetahui betul bagaimana susahnya kehidupan petani garam. "Sejak kecil ketika saya berumur 8 tahun selalu punya keinginan membantu mereka," katanya.

Tonggak niatnya membantu petani garam terjadi pada tahun 1990 saat Ni Made Toya ke Jepang. Di Negeri Matahari Terbit, ia melihat petani garam sangat dihargai masyarakat atau lingkungan sekitarnya dan tidak seperti di Indonesia. "Kalau orang melihat, ohh... garam, apa itu ngak ada value," ujarnya mengakui sedih dengan

anggapan masyarakat Indonesia terhadap petani garam.

Karena itu, Toya kemudian mulai belajar. Tiap libur kerja setiap tahun dirinya berkunjung ke petani garam di Okinawa yang sangat terkenal dengan tradisi garam. "Saya belajar dan lihat bagaimana mereka mengolah garamnya dan ternyata sama seperti di Indonesia," katanya.

Kemudian tahun 1994, Toya juga sempat pergi ke Korea. Negeri Ginseng terkenal dengan smoked salt. Dirinya juga melihat bagaimana proses smoked. Toya juga berkunjung ke Prancis yang sangat terkenal dengan produk garamnya.

"Dari belajar di tiga negara ini, saya coba membuat dengan garam kita sendiri saat pulang ke Indonesia tahun 2000," katanya. Lalu Toya mencoba membuat aneka produk garam dengan berbagai cita rasa dari garam asli Indonesia. Bahkan ketika mengikuti kompetisi di Jepang ternyata garam buatan Toya menang.

Keberhasilan itu membuat Toya semakin berkeinginan bisa membantu petani supaya garam Indonesia jadi terkenal dan harganya pun dihargai tinggi. Kemudian ia membangun usaha dengan nama Toya Salt yang bertujuan mendukung petani garam Indonesia.

"Saya fokuskan pas pulang ke Bali 6 tahun lalu. Saya putuskan memulai bisnis garam untuk membantu petani garam," katanya. Namun Toya mengakui, garam yang dihasilkan petani memang mutunya masih kurang baik, karena diproduksi secara tradisional.

Ni Made Toya mengungkapkan, di Desa Kosambe, Bali saat ini tiap desa hanya sekiyat 4 orang petani garam. Padahal sebelumnya cukup banyak, tapi kini hampir 95 persen sudah tidak mau bertani garam lagi, karena harganya sangat murah dan tidak menguntungkan.

Kondisi yang sama Toya melihat terjadi di sentra garam lainnya di Indonesia, kecuali di Pulau Madura. "Siapa yang mau bertani garam kalau harganya murah Rp 1.000-2.000. Dari dulu harganya tidak pernah berubah, lalu sehari petani dapatnya hanya 10-20 kg. Kalau dijual Rp 2.000/kg kan tidak ada keuntungan. Mau makan apa mereka?" sesalnya.

Toya kemudian membina petani garam yang masih ada. Di Bali ada 12 petani garam, di Sumba sekitar 37 petani garam dan petani di sentra

garam lainnya. "Total semua petani garam binaan saya ada 72 orang di 7 propinsi. Mereka itu masih bisa saya rangkul," katanya.

Karena produksinya masih tradisional, Toya harus melakukan proses ulang agar sesuai standar kualitas internasional untuk dimakan. Namun ke depan, Toya berniat ingin membuat pabrik garam agar bisa memproduksi garam sendiri.

Dengan motto Salt Is My Life, Toya Salt akan membantu petani garam dengan membuat garam lebih inovatif dan sehat. Untuk itu, kualitasnya harus memiliki standar lebih tinggi dari harga pasaran yang dijual petani garam.

Saat ini Toya membeli garam dari 72 petani binaan dengan harga

Rp 10.000-15.000/kg. Hitungannya, jika petani garam mendapatkan 10 kg/hari, maka penghasilan petani sebesar Rp 100 ribu. Artinya dalam satu bulan dapat Rp 3 juta.

"Itu yang saya mau kembangkan agar anak muda mau kembali bertani garam. Kalau melihat harganya tinggi seperti itu, mereka pasti berpikir lumayan mendapatkan Rp 3 juta," tuturnya. Dengan demikian, generasi muda di kampung tidak perlu lagi mencari pekerjaan di kota.

PR-nya bagi Toya adalah bagaimana mengedukasi anak muda agar mau bekerja di desa sendiri berusaha garam. Bahkan menjadikan garam bernilai sama dengan seni bagi masyarakat Pulau Dewata. **Echa/Yul**

Bangun Desa Wisata Garam



salah satu upaya Toya agar semakin banyak masyarakat tertarik dan membantu petani garam. Desa wisata garam nanti juga sebagai showroom garam dari berbagai daerah Indonesia.

"Nanti semua petani garam dari seluruh Indonesia masuk ke dalam desa wisata. Kita bantu penjualan dan promosinya untuk membantu petani. Bahkan cita rasa garam akan semakin bervariasi sesuai spesifikasi dari daerahnya," katanya.

Saat ini Toya Salt memiliki 24 varian smoked salt. Namun demikian ada juga rasa mix yang di oven dan garam untuk spa. Selain garam untuk masakan, Toya Salt menyediakan bath salt atau garam untuk campuran berendam maupun relaksasi dengan berbagai varian yang memiliki aroma berbeda. Untuk garam relaksasi antara lain sandalwood, mint, lavender, dan masih banyak lainnya. **Echa/Yul**

Niat Ni Made Toga dengan Toya Salt sudah bulat untuk mengangkat derajat garam Indonesia. Rencana Maret 2022, ia berniat membangun pabrik garam dengan modal lahan sekitar 8 hektar (ha). "Cita-cita saya nanti ingin menjadikan desa wisata garam. Di dalamnya akan saya bangun museum garam, dan ada proses pembuatannya dari awal sampai produk jadi," tuturnya. Desa Wisata Garam menjadi